



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintahan Aceh ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Aceh, sudah tidak sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
 9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
 10. Qanun .../2

10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 116);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur organisasi perangkat daerah pada Pemerintahan Aceh.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
7. Klasifikasi adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
8. Klasifikasi Arsip adalah kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan tugas dan fungsi SKPA.
9. Pengkodean adalah alat untuk mengenali masalah yang terkandung dalam arsip dan disamping itu juga sebagai alat penentu, dimana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan.

BAB II
KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 2

Klasifikasi Arsip meliputi pengkodean dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPA.

- r. .17 Kabupaten Bener Meriah;
- s. .18 Kabupaten Pidie Jaya;
- t. .71 Kota Banda Aceh;
- u. .72 Kota Sabang;
- v. .73 Kota Lhokseumawe;
- w. .74 Kota Langsa; dan
- x. .75 Kota Subulussalam.

Pasal 6

Rincian dan tata cara penggunaan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

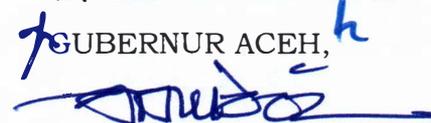
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Desember 2021
27 Jumadil awal 1443

GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Desember 2021
27 Jumadil awal 1443

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 56

I. KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

1. Klasifikasi Kearsipan disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan Kegiatan pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Aceh.
2. Klasifikasi diperinci secara desimal, dengan mempergunakan tiga angka dasar
3. Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, dengan penulisan Klasifikasi sebagai berikut:

Contoh:

1 4 5

1	100 : Pokok Masalah ttg PEMERINTAHAN
4	140 : Sub Masalah ttg PEMERINTAH GAMPONG/KELURAHAN
5	145 Sub Masalah ttg ADMINISTRASI GAMPONG/KELURAHAN

4. Rincian Klasifikasi yang menampung masalah-masalah fasilitasi dan substansi SKPA adalah :

000 UMUM

- 010 URUSAN DALAM
- 020 PERALATAN
- 030 KEKAYAAN DAERAH
- 040 PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI
- 050 PERENCANAAN DAN EVALUASI
- 060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN
- 070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 080 KONPERENSI / RAPAT KOORDINASI
- 090 PERJALANAN DINAS

100 PEMERINTAHAN

- 110 PEMERINTAHAN PUSAT
- 120 PEMERINTAHAN PROVINSI
- 130 PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA
- 140 PEMERINTAHAN KAMPONG / KELURAHAN
- 150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD
- 160 DPRD PROVINSI
- 170 DPRD KABUPATEN / KOTA
- 180 HUKUM
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

200 POLITIK

- 210 KEPARTAIAN
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKTAN
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
- 260 ORGANISASI WANITA
- 270 PEMILU, PILKADA
- 280 PENGAWASAN PEMILU / PILKADA

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 310 PERTAHANAN
- 320 KEMILITERAN / TNI
- 330 KEAMANAN
- 340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- 350 KEJAHATAN
- 360 BENCANA
- 370 KECELAKAAN
- 380 PENDAMPINGAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
- 390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 410 PEMBANGUNAN KAMPONG / KELURAHAN
- 420 PENDIDIKAN
- 426 KEOLAHRAGAAN
- 427 KEPEMUDAAN
- 430 KEBUDAYAAN
- 440 KESEHATAN
- 445 RSU, RSJ, RS Khusus
- 450 AGAMA
- 460 SOSIAL
- 470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- 475 TRANSMIGRASI
- 476 KELUARGA BERENCANA
- 480 MEDIA MASSA

500 PEREKONOMIAN

- 510 PERDAGANGAN
- 518 KOPERASI
- 520 PERTANIAN
- 522 KEHUTANAN
- 523 PERIKANAN DAN KELAUTAN
- 524 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
- 525 PERKEBUNAN
- 526 KETAHANAN PANGAN
- 527 PENYULUHAN
- 530 PERINDUSTRIAN
- 540 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- 550 PERHUBUNGAN
- 554 POS
- 555 TEKNOLOGI INFORMASI
- 556 PARIWISATA DAN REKREASI
- 557 METEOROLOGI
- 560 TENAGA KERJA
- 570 PENANAMAN MODAL
- 580 PERBANKAN MONETER
- 590 AGRARIA

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

- 610 PENGAIRAN
- 620 JALAN
- 630 JEMBATAN
- 640 BANGUNAN
- 650 TATA RUANG KOTA
- 660 TATA LINGKUNGAN
- 670 KETENAGAAN
- 680 PERALATAN PEKERJAAN UMUM
- 690 AIR MINUM

700 PENGAWASAN

- 710 BIDANG PEMERINTAHAN
- 720 BIDANG POLITIK
- 730 BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN
- 740 BIDANG KESEJAHTRAAN RAKYAT
- 750 BIDANG PEREKONOMIAN
- 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
- 770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
- 780 BIDANG KEPEGAWAIAN
- 790 BIDANG KEUANGAN

800 KEPEGAWAIAN

- 810 PENGADAAN
- 820 MUTASI
- 830 KEDUDUKAN
- 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
- 850 CUTI
- 860 PENILAIAN
- 870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN
- 880 PEMBERHENTIAN
- 890 KEPENDIDIKAN PEGAWAI

900 KEUANGAN

- 910 ANGGARAN
- 920 AKUNTANSI
- 930 PERBENDAHARAAN
- 940 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
- 950 PENGELOLAAN KAS DAERAH
- 960 EVALUASI DAN PENGENDALIAN
- 970 PENDAPATAN

B. RINCIAN KODE KLASIFIKASI

000 UMUM

- 001 Lambang
 - .1 Garuda
 - .11 Lambang/logo Provinsi
 - .12 Lambang/logo Kabupaten/Kota
 - .2 Bendera

- .21 Bendera Kebangsaan
- .22 Bendera Aceh
- .3 Lagu Kebangsaan
- .31 Hymne Aceh
- 002 Tanda Kehormatan / Penghargaan (Khusus untuk Non PNS)
 - .1 Bintang
 - .2 Satyalencana
 - .3 Satyakarya Nugraha
 - .4 Monumen
 - .5 Penghargaan Secara Adat
 - .6 Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura, dsb)
- 003 Hari Raya/Besar
 - .1 Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Anak, HKSN dsb)
 - .2 Hari Raya Keagamaan
 - .3 Hari Ulangtahun / HUT (Hari jadi Provinsi/Kabupaten/Kota)
 - .4 Hari-hari Besar Internasional
- 004 Ucapan
 - .1 Terimakasih
 - .2 Selamat
 - .3 Belasungkawa
 - .4 Ucapan lainnya
- 005 Undangan yang bersifat umum
- 006 Tanda Jabatan
 - .1 Pamong praja
 - .2 Pejabat lainnya
- 007 Mohon Diri
- 010 URUSAN DALAM**
- 011 Gedung Kantor, termasuk instalasi Prasarana Pamong/Kantor Dinas
- 012 Rumah Dinas
 - .1 Tanah untuk Rumah Dinas
 - .2 Perabot Rumah Dinas
 - .3 Rumah Dinas Golongan 1
 - .4 Rumah Dinas Golongan 2
 - .5 Rumah Dinas Golongan 3
 - .6 Rumah/Bangunan Lainnya
 - .7 Rumah Pejabat Negara
- 013 Akomodasi/Persinggahan (Mess/Gues House/Wisma/hotel) Milik Pemerintah Daerah
- 014 Rumah Susun/Apartemen
- 015 Penerangan Listrik /Jasa Listrik
- 016 Telepon/Faximile/Internet
 - .1 Website
 - .2 E-mail
 - .3 Sosial media
- 017 Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
 - .1 Upacara Bendera
 - .2 Tata Tempat
 - .21 Pemasangan gambar Presiden/Wakil Presiden
 - .3 Audiensi/menghadap pimpinan
 - .4 Alamat - alamat kantor dan Pejabat
 - .5 Bandir /Umbul - umbul/Spanduk

020 PERALATAN

- .1 Penawaran
- 021 Alat Tulis
- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot Kantor
- 024 Alat Angkutan
- 025 Pakaian Dinas/ID CARD/Atribut lainnya
- 027 Pengadaan
- 028 Inventaris

030 KEKAYAAN DAERAH

- 031 Sumber Daya Alam
- 032 Asset Daerah (Barang bergerak dan barang tidak bergerak)
- 033 Pemanfaatan Kekayaan Daerah
- 034 Penghapusan Kekayaan Daerah
- 035 -
- 036 -
- 037 -
- 038 -
- 039 -

040 PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI

- 041 Perpustakaan
 - .1 Umum
 - .2 Khusus
 - .3 Perguruan Tinggi
 - .4 Sekolah
 - .5 Keliling
 - .6 Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Gampong
- 042 Dokumentasi
- 043 Layanan Perpustakaan , Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka
 - .1 Pengolahan bahan pustaka
 - .2 Koleksi bahan pustaka umum
 - .3 Koleksi bahan pustaka daerah
 - .4 Sirkulasi / layanan
 - .5 Keanggotaan
 - .6 Pemeliharaan, Pelestarian / alih media bahan bahan putaka
 - .7 Pameran Bahan Perpustakaan
 - .8 Penghapusan / Penyusutan Bahan Perpustakaan keliling, Masyarakat)
- 044 Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan (Sistem dan SDM)
 - .1 Minat baca
 - .2 Otomasi perpustakaan
 - .3 Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan
 - .4 Norma, Standar dan Prosedur Perpustakaan
 - .5 Apresiasi perpustakaan
 - .6 Transformasi perpustakaan
 - .7 Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar perpustakaan
 - .8 Tenaga Perpustakaan

- 045 Kearsipan
 - .1 Pola Klasifikasi
 - .2 Penataan Berkas
 - .3 Penyusutan Arsip
 - .31 Jadwal Retensi Arsip
 - .32 Pemandahan Arsip
 - .33 Penilaian Arsip
 - .34 Pemusnahan Arsip
 - .35 Penyerahan Arsip
 - .36 Berita Acara Penyusutan Arsip
 - .37 Daftar Pencarian Arsip
 - .38 Akuisisi Arsip
 - .4 Pembinaan Kearsipan
 - .41 Bimbingan dan konsultasi kearsipan
 - .42 Sosialisasi Kearsipan
 - .43 Pengawasan Kearsipan
 - .44 Norma, Standar dan Prosedur Kearsipan
 - .45 Apresiasi kearsipan
 - .5 Pemeliharaan / Perawatan Arsip
 - .51 Alih Media
 - .52 Restorasi Arsip
 - .6 Pengawetan /Fumigasi
 - .7 Layanan dan akses Kearsipan
 - .71 Pameran dan publikasi Kearsipan
 - .72 Survey, Pendataan Dan Pelacakan Arsip
 - .73 Penerbitan Naskah Sumber Arsip
 - .8 Jaringan Informasi kearsipan Nasional
 - .81 Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Dinamis
 - .82 Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Statis
- 046 Sandi
- 047 Website
- 048 Pengelolaan Data
- 049 Jaringan Kominikasi Data
- 050 PERENCANAAN**
 - .1 Repelita (RPJM NASIONAL)
 - .11 Pelita Daerah (RPJM ACEH, RPJM KABUPATEN/KOTA, RENSTRA)
 - .12 Bantuan Pembangunan Daerah
 - .13 Bappeda (Meliputi kegiatan Musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota, Rencana Kerja Tahunan
- 051 Proyek bidang pemerintahan,klasifikasikan disini:
Proyek prasarana fisik pemerintahan,tambahkan perincian 100 pada 051
Contoh:Proyek kepenjaraan 051.86
- 052 Bidang politik
Proyek prasarana fisik pemerintahan,tambahkan perincian 100 pada 051
Contoh:Proyek kepenjaraan 051.86
- 053 Bidang keamanan dan ketertiban tambahkan perincian 300 pada 053
Proyek prasarana fisik pemerintahan,tambahkan perincian 100 pada 051
Contoh:Proyek kepenjaraan 051.86

- 054 Bidang kesejahteraan rakyat tambahkan perincian 400 pada 054
Contoh:Proyek resettlement desa 054.671
Proyek prasarana fisik pemerintahan,tambahkan perincian 100 pada 051
Contoh:Proyek kepenjaraan 051.86
- 055 Bidang perekonomian tambahkan perincian 500 pada 055
Contoh :Proyek pasar 055.112
- 056 Bidang pekerjaan umum tambahkan perincian 600 pada 056
Contoh:Proyek jembatan 056.3
- 057 Bidang pengawasan
- 058 Bidang kepegawaian
- 059 Bidang keuangan
- 060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN**
- .1 Program Kerja
- 061 Organisasi Instansi Pemerintah (Struktur Organisasi)
- .1 Susunan dan Tata Kerja, Tugas dan Fungsi
- .2 Tata tertib kantor, jam kerja dibulan puasa
- .3 Analisis Jabatan/uraian jabatan
- .4 Analisis Beban Kerja
- .5 Budaya Kerja
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi semi pemerintah, BKS-AKSI dan lain-lain
- 065 Ketatalaksanaan/Tata naskah/sistem, mekanisme dan prosedur
- 066 Stempel dinas
- 067 Pelayanan umum/pelayanan publik/analisis
- 068 Komputerisasi/siskomdagri
- 069 Standar pelayanan minimal
- 070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
- 071 Riset meliputi perijinan bagi peneliti, Riset Design, Pembahasan sampai dengan laporan akhir riset
- 072 Survey / pengembangan
- .1 Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)
- .2 SINAS (Sistem Inovasi Nasional)
- .3 SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi, Cluster, Kab/Kota, desa, inovatif
- .4 Inkubator Teknologi dan Bisnis
- .5 Pameran produk inovasi/Ristek
- .6 BTC (Bisnis Teknologi Center)
- .7 Rapterk (Penerapan Iptek)
- HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)
- 073 Kajian
- .1 Kajian Strategis / Diskusi/Forum Group Discussion (FGD)
- .2 Seminar
- .3 Workshop
- .4 Rapat Koordinasi/Rapat Teknik
- .5 Lokakarya
- .6 Diseminasi/sosialisasi hasil penelitian
- 074 Kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi
- 075 Kerja sama penelitian dengan Kementerian lainnya
- 076 Kerja sama penelitian dengan Non kementerian
- 077 Kerja sama penelitian dengan Provinsi

- 078 Kerja sama penelitian dengan Kabupaten/Kota
079 Kerja sama penelitian dengan Kecamatan/desa
080 KONFERENSI / RAPAT / SEMINAR
081 Gubernur
082 Bupati/Walikota
083 Komponen Eselon Lainnya
084 Instansi lainnya
085 Internasional di Dalam Negeri
086 Internasional di Luar Negeri
090 PERJALANAN DINAS
091 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Daerah
092 Perjalanan Menteri ke Daerah
093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
094 Perjalanan Pegawai termasuk pemanggilan Pegawai
095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
096 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri
097 Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
100 PEMERINTAHAN
101 Tata praja, legeslatif,yudikatif,hubungan luar negri
102 Gerakan Disiplin Nasional
103 Laporan Akuntabiitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
104 -
105 -
110 PEMERINTAHAN PUSAT
111 Presiden
Meliputi : Pencalonan,pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah terima jabatan
.1 Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR
.2 Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan / Pidato
112 Wakil Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan,
sumpah dan serah terima jabatan
113 Susunan Kabinet
.1 Reshuffle
.2 Penunjukan Menteri ad intern
.3 Sidang Kabinet
114 Kementrian Dalam Negeri
.1 Amanat Menteri Dalam Negeri/Sambutan
115 Kementrian Lainnya
116 Lembaga Tinggi Negara
117 Lembaga Non Kementrian
118 Otonomi Daerah / Desentralisasi / Dekonsentrasi
119 Kerjasama antar Kementrian
120 PEMERINTAH PROVINSI
.04 Laporan Daerah
.042 Monografi. tambahkan kode wilayah
.1 Koordinasi
.2 Instansi Tingkat Provinsi
.21 Dinas Otonom
.22 Instansi Vertikal
.23 Kerjasama Antar Provinsi/Daerah
121 Gubernur Aceh
Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meniggal, Pelantikan, Pemberhetian,
Serah Terima Jabatan dan sebagainya.

- 122 Wakil Gubernur Aceh
Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meniggal, Pelantikan, Pemberhentian,
Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 123 Sekretaris Daerah Aceh
Meliputi : Pencalonan, Penagkata, Menigggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah
Terima Jabatan dan sebagainya.
- 124 Forum Koordinasi Pemerintah Provinsi
- .1 Muspida
 - .2 Forum Panitia Anggaran Nasional (PAN)
 - .3 Forum Koordinasi lainnya
- 125 Pembentukan Pemekaran Wilayah
Meliputi : Pembinaan/perubahan nama daerah, kota, benda, geografis, gunung,
sungai, pulau, selat, batas laut, dan sebagainya.
- .1 Pembentukan Daerah Otonom
 - .2 Pembentukan Wilayah
 - .3 Pemindahan Ibukota
 - .4 Perubahan batas wilayah
 - .5 Pemekaran wilayah
 - .6 Permasalahan Batas Wilayah
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Penyerahan Urusan
- 128 Swapraja/Penataan Wilayah/Daerah
- 130 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**
- 131 Bupati/walikota ,tambahkan kode wilayah
Meliputi: Pencalonan Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian,
Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- .1 Sambutan/Pengarahan/Amanat
- 132 Wakil Bupati/Walikota, tambahkan kode wilayah
Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian
Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 133 Sekretaris daerah kabupaten/kota,tambahkan kode wilayah
Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan,
Pemberhentian, Serah Terima Jabatan.
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota
- .1 Musppida
 - .2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
 - .3 Forum Koordinasi Lainnya
 - .4 Kerjasama Antar Kabupaten/Kota
- 135 Pembentukan/pemekaran wilayah
- .1 Pemindahan Ibukota
 - .2 Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota dan atau
Perwakilan Kabupaten/Kota di luar Daerah
 - .3 Pembagian Wilayah Kabupaten/Kota
 - .4 Perubahan Batas Wilayah
 - .5 Pemekaran Wilayah
 - .6 Permasalahan Batas Wilayah
 - .7 Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota
 - .8 Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten /Kota, Daerah, Jalan
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan
- 138 Pemerintah Wilayah Kecamatan
- .1 Sambutan/Pengarahan/Amanat
 - .2 Pembentukan Kecamatan

- .3 Pemekaran Kecamatan
- .4 Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
- .5 Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren
- .6 -
- .7 -
- 139 Pemerintahan Mukim
 - .1 Imum Mukim
Meliputi : Pencalonan Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dan sebagainya
- 140 PEMERINTAHAN GAMPONG / KELURAHAN**
- 141 Pamong Desa/Gampong atau nama lain
Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan sebagainya
- 142 Penghasilan Pamong Desa/Gampong atau nama lain
- 143 Kekayaan Desa/Gampong atau nama lain
- 144 Dewan Tingkat Desa/Gampong, Tuha Peut, Tuha Lapan, Dewan Marga/
Rembug Desa/Gampong atau nama lain
- 145 Administrasi Desa/Gampong atau nama lain
- 146 Kewilayahan
 - .1 Pembentukan desa/Gampong atau nama lain
 - .2 Pemekaran desa/Gampong atau nama lain
 - .3 Perubahan Batas Wilayah Perluasan Desa /Gampong atau nama lain
 - .4 Perubahan nama Desa/Gampong atau nama lain
 - .5 Kerjasama antar Desa/Gampong atau nama lain
 - .6 Petugas Registrasi Desa/Gampong atau nama lain
- 147 Lembaga-lembaga Tingkat Desa/Gampong atau nama lain
Jangan klasifikasikan disini, lihat 410 dengan perinciannya
- 148 Perangkat Desa/Gampong atau nama lain
 - .1 Kepala Desa/Gampong atau nama lain
 - .2 Sekretaris Desa/Gampong atau nama lain
 - .3 Staf Desa/Gampong atau nama lain
- 149 Dewan Desa/Gampong atau nama lain
 - .1 Dusun
 - .2 Jurong atau nama lain
- 150 LEGISLATIF MPR/DPR/DPD**
- 151 Keanggotaan MPR
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pemberhentian
 - .3 Recall
 - .4 Pelanggaran
- 152 Persidangan
- 153 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 154 Hak
- 155 Keanggotaan DPR /DPD Pencalonan, Pengangkatan, Persidangan, Sidang
Pleno Dengar Pendapat/Rapat Komisi
- 156 Reses
- 157 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak

- 160 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)**
- 161 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .4 Recall /Pergantian Antar Waktu
 - .5 Meninggal Dunia
 - .6 Pelanggaran
 - .7 Mengundurkan Diri
 - .8 Alat Kelengkapan Dewan
 - .81 Pimpinan
 - .82 Badan Musyawarah
 - .83 Komisi
 - .84 Badan Legislasi Daerah
 - .85 Badan Anggaran
 - .86 Badan Kehormatan
 - .87 Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
- 162 Persidangan
 - .1 Reses
- 163 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 164 Hak
- 165 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
- 166 -
- 167 -
- 168 -
- 169 -
- 170 DPRD KABUPATEN / KOTA TAMBAHKAN KODE WILAYAH**
- 171 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .4 Recall/Pergantian Antar Waktu
 - .5 Pelanggaran
- 172 Persidangan
- 162 Persidangan
 - .1 Reses
- 173 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 174 Hak
- 175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
- 176 -
- 177 -
- 178 -
- 179 -
- 180 HUKUM**
 - .1 Konstitusi
 - .11 Dasar Hukum
 - .12 Undang - undang dasar
 - .2 GBHN
 - .3 Amnesti, Abolisi dan Grasi

- 181 Perdata
 - .1 Tanah
 - .2 Rumah
 - .3 Utang / Piutang
 - .31 Gadai
 - .32 Hipotik
 - .4 Notariat
- 182 Pidana
 - .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 183 Peradilan
 - Peradilan
 - Peradilan agama islam 451.6
 - Peradilan perkara tanah 593.71
 - .1 Bantuan Hukum
- 184 Hukum Internasional
- 185 Imigrasi
 - .1 Visa
 - .2 Paspor
 - .3 Exit Permit
 - .4 Reentry
 - .5 Lintas Batas / Batas Antar Negara
- 186 Kepenjaraan
 - .1 Lemabaga Pemasarakatan (LAPAS)
 - .2 Rumah Tahanan
- 187 Kejaksaan
- 188 Peraturan Perundang Undangan
 - .1 TAP MPR
 - .2 Undang-Undang Dasar
 - .3 Peraturan
 - .31 Peraturan Pemerintah
 - .32 Peraturan Presiden
 - .33 Peraturan Menteri
 - .34 Peraturan lembaga non Kementerian
 - .35 Peraturan Daerah/Qanun
 - .351 Peraturan Daerah/ Qanun Aceh
 - .352 Peraturan Daerah / Qanun kabupaten/kota
 - .353 Peraturan Gubernur
 - .354 Peraturan Bupati/Wali Kota
 - .4 Keputusan
 - .41 Presiden
 - .42 Menteri
 - .43 Lembaga Non Departemen
 - .44 Gubernur
 - .45 Bupati / Walikota
 - .5 Instruksi
 - .51 Presiden
 - .52 Menteri
 - .53 Lembaga Non Departemen
 - .54 Gubernur
 - .55 Bupati / Walikota

- 189 Hukum adat
 - .1 Adat
 - .2 Adat Istiadat
 - .3 Kebiasaan
 - .4 Reusam
 - .5 Sayam
 - .6 Tokoh Adat
 - .7 Rumah Adat
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI**
- 191 Perwakilan Asing
- 192 Tamu Negara
- 193 Kerjasama Diplomatik Dengan Negara Asing
 - .1 ASEAN
 - .2 Bantuan Luar Negeri/Hibah
- 194 Perwakilan RI Diluar Negeri
- 195 PBB
- 196 Laporan Luar Negeri
- 197 Hutang luar negeri PHLM/LOAN
- 198 -
- 199 -
- 200 POLITIK**
- 201 Kebijakan umum
- 202 Orde baru
- 203 Reformasi
- 204 -
- 205 -
- 206 -
- 207 -
- 210 KEPARTAIAN**
- 211 Lambang partai
- 212 Kartu tanda anggota
- 213 Bantuan Keuangan Parpol
- 214 Pendirian Parpol (Partai Nasional /Partai Lokal)
- 215 Pembubaran Parpol
- 216 Pembinaan Parpol
- 217 AD/ART Parpol
- 218 Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL
- 219 -
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN**
- 221 Berdasarkan Perjuangan
 - .1 Perintis Kemerdekaan
 - .2 Angkatan 45
 - .3 Veteran
- 222 Berdasarkan Kekaryaannya
 - .1 PEPABRI
 - .2 Wredatama
- 223 Berdasarkan Kerohanian
- 224 Lembaga Adat
- 225 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 226 AD/ART ORMAS
- 227 Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan ORMAS
- 228 -
- 229 -

230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL

- 231 Ikatan dokter indonesia
- 232 Persatuan Guru Republik Indonesia
- 233 Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
- 234 Persatuan Advokat Indonesia
- 235 Lembaga bantuan hukum indonesia
- 236 Korps pegawai republik indonesia
- 237 Persatuan wartawan indonesia
- 238 Ikatan cendekiawan muslim indonesia
- 239 Organisasi Profesi dan Fungsional Lainnya

240 ORGANISASI PEMUDA

- 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
- 242 Organisasi Mahasiswa
- 243 Organisasi Pelajar
- 244 Gerakan Pemuda Ansor
- 245 Gerakan Pemuda Islam Indonesia
- 246 Gerakan Pemuda Marhaenis
- 247 Gerakan Pemuda Partai
- 248 Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)
- 249 Organisasi / Gerakan Pemuda Lainnya

250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN

- 251 Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI)
- 252 Organisasi Buruh Internasional (OBI)
- 253 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
- 254 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
- 255 Keluarga Sopir Proporsional Indonesia (KSPI)
- 256 Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA)
- 257 -
- 258 -
- 259 -

260 ORGANISASI WANITA

- 261 Dharma Wanita
- 262 Persatuan Wanita Indonesia
- 263 Pemberdayaan Perempuan (Wanita)
- 264 Kongres Wanita
- 265 Badan Kontak Organisasi Wanita
- 266 AD/ART Organisasi Wanita
- 267 Struktur/ Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan Organisasi Wanita
- 268 -
- 269 -

270 PEMILU (PEMILIHAN UMUM) PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)

- 271 Pencalonan
- 272 Nomor Urut/Tanda Gambar
- 273 Kampanye
- 274 Petugas Pemilu
- 275 Pemilih/Daftar Pemilih
- 276 Sarana
 - .1 TPS
 - .2 Kendaraan
 - .3 Surat Suara
 - .4 Kotak Suara
 - .5 Dana
 - .6 Bilik Suara
 - .7 Bukti telah memilih

- 277 Pemungutan Suara/Perhitungan Suara
- 278 Penetapan Hasil Pemilu
- 279 Penetapan Peroleh Jumlah Kursi Dan Calon Terpilih
- 280 Pengucapan sumpah janji MPR,DPR,DPD
- 281 Pemantauan
- 282 Pelanggaran
- 283 Sengketa
- 284 Panwaslu/Panwaslih
- 285 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh
- 286 -
- 287 -
- 288 -
- 289 -
- 290 Organisasi Keistimewaan dan Kekhususan Aceh
- 291 Wali Nanggroe
- 292 Majelis Adat Aceh (MAA)
- 293 Majelis Pendidikan Aceh (MPA)
- 294 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
- 295 Baitul Mall Aceh
- 296 Badan Reintergrasi Aceh (BRA)
- 297 Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh (KKR)
- 298 -
- 299 -
- 300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- 301 Keamanan
 - .1 Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
- 302 Ketertiban
 - .1 Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
- 303 Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ancaman keamanan/
ketertiban umum
- 304 Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan
- 305 Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)
- 306 Pengawasan Trantibum
- 307 Penegakan pelaksanaan Perda/Qanun
- 308 Pembinaan /Penyuluhan Pelanggaran Perda/Qanun
- 309 Laporan Kunjungan VIP,VVIP,tamu asing
 - .1 Pengamanan
 - .2 Pengawalan
- 310 PERTAHANAN**
- 311 Darat
- 312 Laut
- 313 Udara
- 314 Perbatasan
- 315 Ketahanan Bangsa
- 316 Ketahanan Ekonomi
- 317 Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
- 318 -
- 319 -
- 320 KEMILITERAN/TNI**
- 321 Latihan Militer
- 322 Wajib Militer
- 323 Operasi Militer
- 324 Kekaryaannya TNI pejabat sipil dari TNI
 - .1 TMD

- 325 Darurat Militer
- 326 -
- 327 -
- 328 -
- 329 -
- 325 Kemanunggalan TNI dengan Rakyat
- 330 KEAMANAN**
- 331 Kepolisian
 - .1 Polisi Pamong Praja
 - .2 Kamra
 - .3 Kamling
 - .4 Jaga wana
 - .5 Darurat Sipil
- 332 Huru-Hara/Demonstrasi
- 333 Senjata Api/Tajam
- 334 Bahan Peledak
- 335 Perjudian
- 336 Surat-surat Kaleng
- 337 Pengaduan
- 338 Himbauan/larangan
- 339 Teroris
- 340 PERTAHANAN SIPIL**
- 341 Perlindungan Sipil
 - .1 Kebijakan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas
 - .2 Pembinaan dan Diklat
 - .3 Pengangkatan/Pemberhentian Anggota Linmas
 - .4 Pengerahan dan Pengendalian Linmas
 - .5 Kesejahteraan bagi anggota Linmas
- 342 Latihan PAM swakarsa
- 343 Data Linmas, PAM Swakarsa
- 344 Kegiatan Pelaksanaan Linmas
- 345 -
- 346 -
- 347 -
- 350 KEJAHATAN**
- 351 Makar/Pemberontakan
- 352 Pembunuhan
 - .1 Bunuh Diri
- 353 Penganiayaan/Pencurian/Perampasan
- 354 Subversi/penyelundupan/Narkotika
- 355 Pemalsuan/Penipuan
 - .1 Pemalsuan Uang
 - .2 Pencucian Uang
 - .3 Pemalsuan Ijazah
 - .4 Kejahatan Pemalsuan lainnya
- 356 Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan,KKN
- 357 Pemerksaan/Perbuatan Cabul/Zina
- 358 Kenakalan
- 359 Kejahatan Lainnya
- 360 BENCANA**
- 361 Gunung Merapi/Gempa
- 362 Banjir/Tanah Longsor



- 363 Angin Topan
- 364 Kebakaran
 - .1 Pemadam Kebakaran
- 365 Kekeringan
- 366 Tsunami
- 367 Investigasi dan Mitigasi Bencana
- 368 Tanggap Darurat Bencana/Bantuan Bencana
- 369 Bencana Lainnya
- 370 KECELAKAAN**
- 371 Darat
- 372 Udara
- 373 Laut
- 374 Sungai/Danau
- 375 Latihan SAR
- 376 Satkorlat dan Satlak PBP
- 377 -
- 378 -
- 379 -
- 380 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**
- 381 Kerja Sama Penanggulangan Bencana dengan pihak lain
- 382 Sarana Prasarana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
- 383 Kunjungan lapangan
- 384 Relawan
- 385 Laporan Rehab/Rekon
- 386 -
- 387 -
- 388 -
- 390 WALIYATUL HISBAH**
- 391 Penyelidikan, Penyidikan pelanggaran Syariat Islam
- 392 Pelaksanaan Hukuman Pelanggaran Syariat Islam
- 393 Penyuluhan dan Sosialisasi Syariat Islam
- 394 Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam
- 395 -
- 396 -
- 397 -
- 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT**
- 401 Keluarga miskin/Dhuafa
- 402 PNPM Mandiri pedesaan
- 403 Kebijakan dan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat
- 404 -
- 405 -
- 406 -
- 410 PEMBANGUNAN DESA/GAMPONG ATAU NAMA LAINNYA**
- 411 Pembinaan usaha gotong royong
 - .1 Swadaya Gotong Royong
 - .11 Penataan Gotong Royong
 - .12 Gotong Royog Dinamis
 - .13 Gotong Royong Statis
 - .14 Pungutan
 - .2 Lembaga Sosial Desa/Gampong (LSD/G atau nama lainnya)
 - .21 Pembinaan
 - .22 Klasifikasi

.23	Proyek
.24	Musyawarah
.3	Latihan Kerja Masyarakat (LKM)
.31	Kader Masyarakat
.32	Kuliah Kerja Nyata(KKN)
.33	Pusat Latihan
.34	Kursus-kursus
.35	Kurikulum/silabus
.36	Keterampilam
.37	Pramuka
.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga(PKK)
.41	Program
.42	Pembinaan Organisasi
.43	Kegiatan
.44	Pengarusutamaan Gender (PUG)
.45	Pemberdayaan Perempuan
.5	Penyuluhan
.51	Publikasi
.52	Peragaan
.53	Sosio Drama
.54	Siaran Pedesaan
.55	Penyuluhan Lapangan
.6	Kelembagaan Desa/Gampong atau nama lainnya
.61	Kelompok Tani
.62	Rukun Tani
.63	Subak
.64	Dharma Tirta
.65	Klompencapir
.66	Keujereun Blang
.67	Tani Ternak
412	Perekonomian Desa/Gampong atau nama lainnya
.1	Produksi Desa/Gampong atau nama lainnya
.11	Pengolahan
.12	Pemasaran
.2	Keuangan Desa/Gampong atau nama lainnya
.21	Perkreditan Desa/Gampong atau nama lainnya
.22	Inventarisasi Data
.23	Perkembangan/Pelaksanaan
.24	Bantuan/Stimulans
.25	Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
.3	Koperasi Desa/Gampong atau nama lainnya
.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD) /Gampong atau nama lainnya
.32	Koperasi Unit Desa/Gampong (KUD/G) atau nama lainnya
.33	Badan Usaha Kredit Pedesaan/Gampong atau nama lainnya
.4	Penataan Bantuan Pembangunan Desa/Gampong atau nama lainnya
.41	Jumlah Desa/Gampong atau nama lainnya yang diberi bantuan
.42	Penghargaan
.43	Pusat
.44	Daerah

- .5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa/Gampong (ADG) atau nama lainnya
 - .51 Pusat
 - .52 Daerah
- .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa/Gampong atau nama lainnya
 - .61 Bantuan Langsung
 - .62 Bantuan Keserasian
 - .63 Bantuan Juara Lomba Desa/Gampong atau nama lainnya
- 413 Prasarana Desa dan Sarana Desa/Gampong atau nama lainnya
 - .1 Prasarana Desa/Gampong atau nama lainnya
 - .11 Pembinaan
 - .12 Bimbingan Teknis
 - .2 Pemukiman Kembali Penduduk
 - .21 Lokasi
 - .22 Diskusi
 - .23 Pelaksanaan
 - .3 Masyarakat Pradesa/Gampong atau nama lainnya
 - .31 Pembinaan
 - .32 Penyuluhan
 - .4 Pemugaran, Perumahan dan Lingkungan Desa/Gampong atau nama lainnya
 - .41 Rumah Sehat
 - .42 Proyek Perintis
 - .43 Pelaksanaan
 - .44 Pengembangan
 - .45 Perbaikan Kampung
- 414 Pengembangan Desa/Gampong atau nama lainnya
 - .1 Tingkat Perkembangan Desa/Gampong atau nama lainnya
 - .11 Jumlah Desa/Gampong atau nama lainnya
 - .12 Pemekaran Desa/Gampong atau nama lainnya
 - .13 Pembentukan Desa Baru/Gampong atau nama lainnya
 - .14 Evaluasi
 - .15 Bagan
 - .16 RT Berprestasi
 - .2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
 - .21 Penyuluhan Program
 - .22 Lokasi UDKP
 - .23 Pelaksanaan
 - .24 Bimbingan / Pembinaan
 - .25 Evaluasi
 - .3 Tata Desa /Gampong atau nama lainnya
 - .31 Inventarisasi
 - .32 Penyusunan Pola Tata Desa/Gampong atau nama lainnya
 - .33 Aplikasi Tata Desa/Gampong atau nama lainnya
 - .34 Pemetaan
 - .35 Pedoman Pelaksanaan
 - .36 Evaluasi

- .4 Perlombaan Desa/Gampong atau nama lainnya
- .41 Pedoman
- .42 Penilaian
- .43 Kejuaraan
- .44 Piagam
- 415 Koordinasi
 - .1 Sektor Khusus
 - .2 Rapat Koordinasi Horizontal(RKH)
 - .3 Tim Koordinasi Pusat (TKP)
 - .4 Kerjasama
 - .41 Luar Negeri (UNICEF)
 - .42 Perguruan Tinggi
 - .43 Kementerian/Lembaga Non Kementerian
 - .44 Lembaga Lainnya
- 416 -
- 417 -
- 418 -
- 419 -
- 420 PENDIDIKAN**
 - .1 Pendidikan Khusus Klafikasi disini Pendidikan Putra/i Irian Jaya
- 421 Sekolah/Perguruan Tinggi
 - .1 Pra sekolah
 - .2 Sekolah Dasar
 - .3 Sekolah Menengah
 - .4 Sekolah Tinggi
 - .41 Perguruan Tinggi
 - .42 Diploma (DII dan DIII)
 - .5 Sekolah Kejuruan
 - .6 Kegiatan Sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum
 - .7 Kegiatan Pelajar
 - .71 Reuni Dharma Wisata
 - .72 Pelajar Teladan
 - .73 Resimen Mahasiswa
 - .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
 - .9 Pendidikan Luar Sekolah/ pemberantasan buta huruf
- 422 Administrasi sekolah
 - .1 Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Mapras, Perpeloncoan
 - .2 Tahun Pelajaran/Tahun Akademik
 - .3 Hari Libur
 - .4 Uang sekolah, Klafikasi disini SPP
 - .41 Pembinaan Komite Sekolah
 - .5 Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi
 - .6 Biaya Belajar Mandiri
- 423 Metode Belajar
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium, Seminar
 - .3 Diskusi
 - .4 Kuliah Lapangan, Wydiawisata, KKN, Study Tur, Magang/Praktek/PKL
 - .5 Kurikulum
 - .6 Karya Tulis, Karya Ilmiah
 - .7 Ujian

- 424 Tenaga Pengajar Guru, Dosen, Dekan, Rektor
Klasifikasi disini: Guru Telada
- .1 Pembinaan
 - .2 Peningkatan Kualitas
 - .3 Pengawas Sekolah
 - .4 Tenaga Administrasi
 - .5 Sertifikasi Guru
 - .6 Pertukaran Guru ke Luar Negeri
- 425 Sarana Pendidikan
- .1 Gedung
 - .11 Gedung Sekolah
 - .12 Kampus
 - .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
 - .2 Buku
 - .21 Pedoman/Panduan
 - .3 Perlengkapan Sekolah
 - .4 Sarana Pendukung lainnya
- 426 Keolahragaan
- .1 Cabang olahraga
 - .11 Pembinaan Keolahragaan
 - .2 Sarana dan Prasarana Keolahragaan
 - .21 Gedung Olahraga
 - .22 Stadion
 - .23 Lapangan
 - .24 Kolam Renang
 - .3 Pesta Olahraga, Klasifikasi disini: PraPON, Porwil, PON, Porsade, Sea Games, Kejurnas, Olimpiade, dsb
 - .4 KONI
 - .5 Olah raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll)
 - .6 Pekan Olah Raga Mahasiswa
 - .7 Olahraga Rekreasi/Massal (Senam, Sepeda Santai, Olah Raga Tradisional
 - .8 Iptek dan Industri Olah Raga
 - .9 Kemitraan Olah Raga
- 427 Kepemudaan
Kepemudaan Meliputi : Organisasi Dan Kegiatan Remaja.
Klasifikasi Disini : Gelanggang Remaja
- .1 Pertukaran Pemuda
 - .2 Paskibraka
 - .3 Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja
 - .4 Kemitraan Pemuda
 - .5 Karang Taruna
- 428 Kepramukaan
Klasifikasi disini : Persami, Jambore, Lomba dan Raimuna
- 429 Pendidikan Kedinasan untuk Kemendagri, lihat 890
- 430 KEBUDAYAAN**
- .1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kebudayaan
 - .2 Pekan Kebudayaan Aceh (PKA)
 - .3 Pembinaan Bidang Kebudayaan
- 431 Kesenian
- .1 Cabang Kesenian

- .2 Sarana dan Prasarana
 - .21 Gedung Kesenian
 - .22 Kegiatan Adat/Tradisi
 - .23 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan : Festival, Pentas Seni
- 432 Kepurbakalaan
 - .1 Museum
 - .2 Peninggalan kuno
 - .21 Candi, termasuk pemugaran
 - .22 Benda Cagar Budaya
 - .23 Keraton
 - .24 Pure
 - .25 Situs
- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
 - .1 Bahasa Nasional
 - .2 Bahasa Daerah
- 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan Rakyat, Kesenangan
- 436 Kepercayaan
- 437 -
- 438 -
- 439 -
- 440 KESEHATAN**
 - .1 Standart Kesehatan
- 441 Pembinaan Kesehatan
 - .1 Gizi
 - .2 Mata
 - .3 Jiwa
 - .4 Kanker
 - .5 UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
 - .6 Perawatan
 - .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
 - .8 Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
 - .9 Kesehatan Ibu dan Anak
- 442 Obat - obatan
 - .1 Pengadaan
 - .2 Penyimpanan
 - .3 Penyaluran/Distribusi
- 443 Penyakit Menular
 - .1 Pencegahan
 - .2 Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
 - .21 Kusta
 - .22 Kelamin
 - .23 Frambosia
 - .24 T.B.C/AIDS/HIV/SARS/MARS/COVID-19 dll
 - .3 Epidemiologi dan Karantina (EPIDKA)
 - .31 Kolera
 - .32 Imunisasi/Vaksinasi
 - .33 Surveilense
 - .34 Rabies (Anjing Gila) Antraks
 - .4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)

- .41 Malaria
- .42 Dangué Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF)
- .43 Filaria
- .44 Serangga
- .5 Higiene Sanitasi
- .51 Tempat-Tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan Dan Minuman (TPPMM)
- .52 Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (SANIJAGA)
- .53 Pestisida
- 444 Gizi
 - .1 Kekurangan Makanan bahaya kelaparan, Busung Lapar
 - .2 Keracunan Makanan
 - .3 Menu Makanan Rakyat
 - .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
 - .5 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT/AS)
- 445 Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poli Klinik
 - .1 Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum)
 - .11 Rawat Inap
 - .12 Rawat Jalan
 - .13 IGD
 - .14 IBS
 - .15 ICU
 - .16 MCU (Medical Check Up)
 - .2 Penunjang Medis
 - .21 Farmasi
 - .22 Rekam Medik
 - .23 Radiologi
 - .24 Gizi
 - .25 Laboratorium Klinik
 - .26 Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
 - .27 CSSD / Laundry
 - .3 Keperawatan
 - .4 Komite Medik
 - .5 SPI (Satuan Pengawas Internal)
 - .6 Mutu Rumah Sakit
 - .61 Akreditasi
 - .62 ISO
 - .63 PSBH (Problem Solving for Better Hospital)
 - .64 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
 - .7 IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
 - .8 Promosi Layanan Kesehatan
 - .9 Kasus Hukum Rumah Sakit
- 446 Tenaga Medis
 - .1 Perencanaan Tenaga Medis
 - .2 Pendencygunaan Tenaga Medis
 - .21 Perijinan untuk Tenaga Medis
 - .22 Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
 - .23 TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)

- .3 Diklat Tenaga Kesehatan / Medis
- .4 Diklat Tenaga Kesehatan / Para Medis
- .5 Pendidikan di bidang kesehatan termasuk pendidikan spesialis
- 447 Peralatan kesehatan
 - .1 Standarisasi
 - .2 Penyimpanan
 - .3 Distribusi
 - .4 Perijinan berkaitan dengan alat kesehatan
- 448 Pengobatan Alternatif
 - .1 Pijat
 - .2 Tusuk Jarum/Akupunktur
 - .3 Jamu Tradisional dan Herbal
 - .4 Dukun/Paranormal/Tabib
 - .5 Pengobatan Alternatif Lainnya
- 449 Keluarga Berencana
 - .1 Alat Kontrasepsi
 - .2 Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri
 - .3 Penyuluhan Lapangan KB (PLKB)
 - .4 Pos KB Desa/Gampong
 - .5 Akseptor KB
- 450 AGAMA**
 - .1 Kebijakan dan program pemerintahan dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan
 - .2 Bantuan dibidang keagamaan
- 451 Islam
 - .1 Peribadatan, Pensiyahadatan
 - .11 Shalat
 - .12 Zakat, Infaq, Sedekah
 - .13 Puasa
 - .14 MTQ
 - .15 Umroh dan Haji
 - .2 Rumah Ibadah (Masjid, Mushalla, Meunasah)
 - .3 Tokoh Agama
 - .31 Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan
 - .4 Pendidikan Agama Islam
 - .41 Tinggi (Perguruan Tinggi Agama Islam)
 - .42 Menengah (MTsN, MAN)
 - .43 Dasar (TPA, MIN/MIS, SD IT dan Playgrop)
 - .44 Pondok Pesantren/Dayah
 - .441 Pemberdayaan Santri/Usaha Ekonomi Dayah
 - .442 Managemen Pengasuhan
 - .443 Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - .45 Gedung Sekolah/Pesantren/ Dayah
 - .46 Tenaga Pengajar / Teungku Dayah
 - .47 Buku/Kitab
 - .48 Dakwah / Syiar
 - .481 Gampong Percontohan Syariat Islam
 - .49 Organisasi/Lembaga Pendidikan Pesantren/Dayah
 - .5 Harta Agama, Wakaf, Baitul Mal dsb
 - .51 Hibah
 - .6 Peradilan / Pelanggaran Syariat

- .61 Mahkamah Syariah
- .7 Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia/Majelis Permusyawaratan Ulama)
- .8 Mazhab Agama Islam
- .9 Fatwa Ulama
- 452 Kristen Protestan
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine
 - .4 Mazhab Agama Kristen Protestan
 - .5 Organisasi Gerejani
- 453 Khatolik
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Pastor, Frater
 - .4 Mazhab Agama Khatolik
 - .5 Organisasi Gerejani
 - .6 Misa
 - .7 Kapel
 - .8 Ortodok
 - .9 Roma
- 454 Hindu
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah/Pure
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - .4 Mazhab Agama Hindu
 - .5 Organisasi Agama Hindu
- 455 Budha
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah Candi, Vihara dll
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - .4 Mazhab Agama Budha
 - .5 Organisasi Agama Budha
 - .6 Kong Hu Cu
 - .61 Peribadatan
 - .62 Rumah Ibadah Klenteng dll
 - .63 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - .64 Mazhab Agama Kong Hu Cu
 - .65 Organisasi Agama Kong Hu Cu
- 456 Urusan Haji
 - .1 ONH
 - .2 Manasik
- 457 Kerukunan umat beragama
- 458 Aliran sesat
- 459 -
- 460 SOSIAL**
- 461 Rehabilitasi Penyandang Cacat
 - .1 Cacat Mata
 - .2 Cacat Fisik
 - .3 Cacat Mental
 - .4 Bisu/Tuli (Tuna Rungu)
 - .5 Tuna Grahita

- 462 Tuna sosial / Rehabilitasi Sosial
 - .1 Gelandangan/ Orang Terlantar, Anak Jalanan
 - .2 Pengemis
 - .3 Tuna Susila
 - .4 Anak Nakal
- 463 Kesejahteraan Anak / Keluarga
 - .1 Anak Putus Sekolah
 - .2 Ibu Teladan
 - .3 Anak Asuh
 - .4 Anak Terlantar
- 464 Pembinaan Pahlawan
 - .1 Pahlawan
Meliputi : Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan Kepada Pahlawan dan Jandanya
 - .2 Perintis Kemerdekaan
Meliputi : Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan Kepada Perintis Kemerdekaan dan Jandanya
 - .3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
 - .1 Lanjut Usia
 - .2 Korban Kekacauan, Pengungsian, Repatriasi
 - .3 Masyarakat Miskin : Raskin, BLT dll
- 466 Sumbangan Sosial
 - .1 Korban Bencana
 - .2 Pencairan Dana Untuk Sumbangan :
Meliputi : Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazaar dan sebagainya
 - .3 Panti Asuhan
 - .4 Panti Jompo
- 467 Bimbingan Sosial
 - .1 Masyarakat Suku Terasing Meliputi : Bimbingan Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat terpencil (PKAT) dan sebagainya
- 468 Palang Merah Indonesia (PMI)
- 469 Makam
 - .1 Umum
 - .2 Pahlawan
 - .3 Khusus Keluarga Raja
 - .4 Krematorium
 - .5 Massal
- 470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**
 - .1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan
- 471 Pendaftaran Penduduk
 - .1 Identitas Penduduk
 - .11 Biodata
 - .12 Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - .13 Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - .14 Kartu Keluarga (KK)
 - .15 Advokasi Identitas Penduduk
 - .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
 - .21 Perpindahan Warga Negara Indonesia (WNI)
 - .22 Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing (WNA) dalam wilayah Indonesia

- .23 Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara
- .24 Daerah Terbelakang
- .25 Bedol Desa / Gampong atau nama lainnya
- .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara
 - .31 Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
 - .32 Orang Asing Tinggal Sementara
 - .33 Orang Asing Tinggal Tetap
 - .34 Perpindahan Penduduk Antar Negara Diwilayah Perbatasan Daerah Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
- .4 Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan
 - .41 Akibat bencana alam
 - .42 Akibat kerusuhan sosial
 - .43 Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
 - .44 Pendaftaran penduduk rentan
- 472 Pencatatan Sipil
 - .1 Kelahiran, Kematian dan Advokasi
 - .11 Kelahiran
 - .12 Kematian
 - .13 Advokasi Kelahiran dan Kematian
 - .2 Perkawinan, Perceraian dan Advokasi
 - .21 Perkawinan Agama Islam
 - .22 Perkawinan Agama non Islam
 - .23 Perceraian Agama Islam
 - .24 Perceraian agama non Islam
 - .25 Advokasi Perkawinan dan Penceraian
 - .3 Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi
 - .31 Pengangkatan anak
 - .32 Pengakuan anak
 - .33 Pengesahan anak
 - .34 Perubahan Akta
 - .35 Pembatalan akta
 - .36 Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta
 - .4 Pencatatan Kewarganegaraan
 - 41 Akibat perkawinan
 - 42 Akibat kelahiran
 - 43 Non Perkawinan
 - 44 Non kelahiran
 - 45 Perubahan WNI ke WNA
 - 46 Naturalisasi (Pewarganegaraan)
- 473 Informasi Kependudukan
 - .1 Teknologi Informasi
 - .11 Perangkat keras
 - .12 Perangkat lunak
 - .13 Jaringan Komunikasi Data
 - .2 Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi
 - .21 Daerah Maju
 - .22 Daerah Berkembang
 - .23 Daerah Terbelakang

- .3 Pengolahan Data Kependudukan
 - .31 Pendaftaran penduduk
 - .32 Kejadian vital penduduk
 - .33 Penduduk non registrasi
- .4 Pelayanan informasi kependudukan
 - .41 Media Elektronik
 - .42 Media Cetak
 - .43 Outlet
- 474 Perkembangan Penduduk
 - .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
 - .11 Struktur jumlah
 - .12 Komposisi
 - .13 Fertilitas
 - .14 Kesehatan Reproduksi
 - .15 Mobilitas penduduk
 - .16 Mortalitas Penduduk
 - .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
 - .21 Anak dan Remaja
 - .22 Penduduk Usia Produktif
 - .23 Penduduk Lanjut Usia
 - .24 Gender
 - .3 Penataan Persebaran Penduduk
 - .31 Migrasi antar wilayah
 - .32 Migrasi internasional
 - .33 Urbanisasi
 - .34 Sementara
 - .35 Migrasi Non Permanen
 - .36 Transmigrasi
 - .361 Penyiapan informasi daerah transmigrasi
 - .362 Kerjasama dibidang transmigrasi
 - .363 Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
 - .364 Pemukiman transmigrasi
 - .4 Perlindungan Pemberdayaan Penduduk
 - .41 Pengarahan Kuantitas Penduduk
 - .42 Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
 - .43 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
 - .44 Partisipasi Masyarakat
 - .5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
 - .51 Pendidikan Jalur Sekolah
 - .52 Pendidikan Jalur Luar Sekolah
 - .53 Pendidikan Jalur Masyarakat
 - .54 Pembangunan Berwawasan Kependudukan
- 475 Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
 - .1 Indikator kependudukan
 - .11 Perumusan penetapan dan pengembangan indikator kependudukan
 - .12 Pemanfaatan Indikator Kependudukan
 - .13 Sosialisasi Indikator Kependudukan
 - .2 Proyeksi Kependudukan
 - .21 Penyusunan dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan
 - .22 Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan
 - .3 Analisis Dampak Kependudukan
 - .31 Penyusunan dan Pengembangan Analisis Dampak Kependudukan

- .32 Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan
- .4 Penyerasian kebijakan Lembaga Non Pemerintah
- .41 Lembaga Internasional
- .42 Lembaga Masyarakat dan Nirlaba
- .43 Lembaga Usaha Swasta
- .5 Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah
- .51 Lembaga Pemerintah
- .52 Pemerintah Provinsi
- .53 Pemerintah Kabupaten/Kota
- .6 Analisis
- 476 Monitoring
- 477 Evaluasi
- 478 Dokumentasi
- 479 -
- 480 MEDIA MASSA**
- 481 Penerbitan
 - .1 Surat kabar
 - .2 Majalah
 - .3 Buku
 - .4 Penerjemahan
 - .5 Buletin
- 482 Radio
 - .1 RRI
 - .11 Siaran pedesaan jangan di klasifikasikan disini lihat : 411.54
 - .2 Non RRI
 - .3 Luar negeri
- 483 Televisi
- 484 Film, Sinetron, Drama,
 - .1 Film Dokumenter
 - .2 Film Perjuangan/Sejarah
- 485 Pers
 - .1 Kewartawanan/Reporter/Presenter
 - .2 Wawancara
 - .3 Informasi Nasional
- 486 Grafika
- 487 Penerangan
 - .1 Pameran Non Komersil
- 488 Operation Room/Media Center
- 489 Hubungan Masyarakat
- 490 Pengaduan Masyarakat
- 491 Publikasi
- 492 Ketentuan Pemasangan Reklame
- 493 Pameran Umum
- 494 Media sosial
- 495 Periklanan
- 496 Banner
- 497 Baliho
- 498 Bilbord
- 499 -

500 PEREKONOMIAN

- .1 Dewan Stabilisasi
- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
- 503 Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai bidang, klasifikasi pada masalahnya
- 504 -
- 505 -
- 506 -

510 PERDAGANGAN

- .1 Promosi perdagangan
 - .11 Pekan Raya
 - .12 Iklan
 - .13 Pameran, Pameran non Komersial Lihat 487.1
 - .14 Tata Niaga
 - .15 Expo
 - .16 Promosi Investasi
- .2 Pelelangan
- .3 Tera
 - .31 Tera dan Tera ulang
 - .32 Takaran
 - .33 Timbangan dan anak Timbangan
 - .34 Kalibrasi
 - .35 Cap tanda tera
 - .36 Biaya tera
- .4 Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
 - .41 Rencana dan program Kerja Bina usaha dan sarana Perdagangan
 - .42 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
 - .43 Pelaksanaan Teknis Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
 - .44 Pemantauan Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
 - .45 Evaluasi dan Pelaporan Bina usaha dan sarana Perdagangan
- .5 Perijinan Perdagangan
- .6 Kerjasama Perdagangan
- 511 Pemasaran
 - .1 Sembilan Bahan Pokok. tambahkan kode wilayah
 - .2 P a s a r
 - .3 Mall, Super Market, Swalayan, Pertokoan, kaki lima, kios
- 512 Ekspor
- 513 Impor
- 514 Perdagangan antar Pulau
- 515 Perdagangan Luar Negeri
- 516 Pergudangan , termasuk tangki penyimpanan, peti kemas/kontainer
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi untuk BUUD,KUD lihat (412.31-412.32)
 - .1 Bina Usaha Koperasi
 - .11 Koperasi Pertanian
 - .12 Koperasi Non Pertanian
 - .13 Permodalan Koperasi

522 KEHUTANAN

- .1 Program
- .11 Hak Pengusahaan Hutan
- .12 Tata Guna Hutan
- .13 Perpetaan Hutan
- .14 Tumpangsari
- .2 Produksi
- .21 Kayu
- .22 Non Kayu
- .3 Sarana Usaha Kehutanan
- .4 Penghijauan, Reboisasi
- .5 Kelestarian
- .51 Cagar alam, Margasatwa, Suaka Margasatwa
- .52 Berburu, meliputi larangan dan izin berburu
- .53 Kebun Binatang
- .54 Konservasi Lahan
- .6 Penyakit / Hama
- .7 Jenis - jenis hutan
- .71 Hutan hidup
- .72 Hutan wisata
- .73 Hutan produksi
- .74 Hutan lindung

523 PERIKANAN DAN KELAUTAN

- .1 Program
- .11 Penyuluhan
- .12 Teknologi
- .2 Produksi
- .21 Pelelangan
- .22 Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
- .23 Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC
- .24 Sertifikasi Kesehatan Ikan
- .3 Usaha Perikanan
- .31 Pembibitan
- .32 Daerah Penangkapan
- .33 Pertambakan Meliputi : Tambak Ikan Air Deras, Tambak Udang, Dll
- .34 Jaring Terapung
- .4 Sarana
- .41 Peralatan
- .42 Kapal
- .43 Pelabuhan
- .44 Cold Storage
- .45 TPI/PPI
- .46 Kesyahbandaran
- .47 Fasilitas Perijinan Perikanan
- .5 Pengusaha
- .6 Nelayan
- .61 Perkampungan Nelayan
- .62 Pelatihan Nelayan
- .63 Pembinaan Wanita Nelayan
- .7 Pengendalian Hama dan Penyakit

- .71 Penyakit Ikan
- .72 Hama Ikan
- .73 Obat-Obatan Termasuk Sertifikasinya
- .8 Konservasi dan Suaka Laut
- .81 Transplantasi bibit Karang
- .82 Terumbu Karang
- .83 Mangrove
- .84 Garam
- .85 Harta Karun di dalam laut
- .86 Pembinaan / Pendidikan masyarakat pesisir
- .9 Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
- .91 Ekspor Hasil Perikanan
- .92 Impor Hasil Perikanan
- .93 Pemasaran Dalam Negeri

524 PETERNAKAN

- .1 Produksi
 - .11 Susu Ternak Rakyat
 - .12 Telur
 - .13 Daging
 - .14 kulit
- .2 Sarana Usaha Ternak
 - .21 Pembibitan
 - .22 Kandang ternak
 - .23 Lahan Kebun Bibit
- .3 Kesehatan Hewan
 - .31 Penyakit Hewan
 - .32 Pos Kesehatan Hewan
 - .33 Tesi pullorum
 - .34 Karantina
 - .35 Pemberantasan Penyakit Hewan Masuk Usaha Pencegahannya
 - .36 Laboratorium Kesehatan Hewan
- .4 Perunggasan
 - .41 Ayam Ras
 - .42 Ayam Buras
- .5 Pengembangan Ternak
 - .51 Inseminasi Buatan
 - .52 Pembibitan atau Bibit Unggul
 - .53 Penyebaran Ternak
- .6 Makanan Ternak
- .7 Tempat Pemotongan Hewan
- .8 Data Peternakan
- .9 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - .91 Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
 - .92 Hygieni dan Sanitasi

525 PERKEBUNAN

- .1 Program
- .2 Produksi
 - .21 Karet
 - .22 T e h

- .23 Tembakau
- .24 Tebu
- .25 Cengkeh
- .26 Kelapa / Kopra / Kelapa Sawit
- .27 Kopi
- .28 Coklat
- .29 Aneka Tanaman
- .3 Usaha Perkebunan
- .31 Benih
- .32 Pembibitan
- .33 Kelompok Perkebunan
- .34 Kemitraan
- .35 Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan
- .36 Pemasaran Hasil Perkebunan
- 526 KETAHANAN PANGAN**
- .1 Program Bimbingan Massal
- .2 Pengembangan Sarana Sumber Daya
- .21 Pembinaan Teknologi
- .22 Sarana Produksi dan Permodalan
- .23 Kelembagaan
- .24 Agribisnis
- .3 Mutu Hasil
- .31 Pengelola Hasil Pangan
- .32 Pemasaran Hasil
- .4 Distribusi Pangan
- .41 Sistem dan Pola Distribusi
- .42 Sarana dan Prasarana Distribusi
- .43 Pengadaan dan Cadangan Pangan
- .5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
- .51 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
- .52 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
- .53 Sistem Informasi Pangan
- 527 PENYULUHAN**
- .1 Sumber Daya Manusia
- .11 Penyuluh
- .12 Stake holder
- .2 Kelembagaan
- .21 Struktural
- .22 Non Struktural
- .23 Lembaga Profesi
- .3 Penyelenggaraan Penyuluhan
- .31 Program/Metode
- .32 Promosi/Pameran/Kampanye
- .33 Penghargaan/Lomba
- .34 Materi
- 530 PERINDUSTRIAN**
- .1 Undang - Undang Gangguan
- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin / Elektronik
- 533 Industri Kimia / Farmasi
- 534 Industri Tekstil



- 535 Industri Makanan / Minuman
- 536 Aneka Industri / Perusahaan
- 537 Aneka Kerajinan
 - .1 Kerajinan Rakyat
- 538 Usaha Negara/BUMN
 - .1 Perjan
 - .2 Perum
 - .3 Persero/PT,CV
- 539 Perusahaan Daerah/BUMD/BLUD
- 540 PERTAMBANGAN DAN KESAMUDERAAN**
 - .1 Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)
 - .2 Rekomendasi & Perijinan
 - .3 Pembinaan dan Pengawasan
- 541 Minyak Bumi/Bensin
 - .1 Pengusahaan
 - .2 Penyaluran
 - .3 Pengolahan, Tangki, Pompa, Tanker
- 542 Gas bumi
 - .1 Eksploitasi/Pengeboran
 - .11 Kontrak Kerja
 - .2 Pengolahan Meliputi : Tangki, Pompa, Tanker
- 543 Aneka Tambang
 - .1 Timah
 - .2 Alunumium, Boxit
 - .3 Besi Termasuk Besi Tua
 - .4 Tembaga
 - .5 Batubara
 - .6 Reklamasi
- 544 Logam Mulia, Emas, Intan, Perak
- 545 Logam
- 546 Geologi
 - .1 Vulkanologi
 - .11 Pengawasan Gunung Berapi
 - .2 Sumur Artesis, Air Bawah Tanah
 - .21 Cekungan Air Tanah (CAT)
 - .22 Rekomendasi Teknis
 - .23 Sumur Artesis
 - .24 Sumur Bor
 - .25 Sumur Gali (Pasak)
 - .26 Pengusaha Pengebor (APATINDO)
 - .27 Sumur Pantau
 - .28 Harga Dasar Air/Nilai Perolehan Air
- 547 Hidrologi
- 548 Kesamudraan
- 549 Pesisir Pantai
- 550 PERHUBUNGAN**
- 551 Perhubungan Darat
 - .1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
 - .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
 - .12 Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
 - .13 Kecelakaan Lalu Lintas

- .2 Angkutan Jalan Raya
 - .21 Perizinan
 - .22 Terminal
 - .23 Alat Angkutan Umum, Pemerintah Daerah
 - .24 Jembatan Timbang/Lebih Muatan
 - .25 Uji Mutu
 - .26 Trayek
- .3 Angkutan Sungai
 - .31 Perizinan
 - .32 Terminal
 - .33 Pelabuhan
 - .34 Keselamatan, Rambu-rambu
 - .35 Trayek
 - .36 Sarana/Kapal
- .4 Angkutan Danau
 - .31 Perizinan
 - .32 Terminal
 - .33 Pelabuhan
 - .34 Keselamatan, Rambu-rambu
 - .35 Trayek
 - .36 Sarana/Kapal
- .5 Feri
 - .31 Perizinan
 - .32 Terminal
 - .33 Pelabuhan
 - .34 Keselamatan, Rambu-rambu
 - .35 Trayek
- .6 Perkeretaapian
 - .61 Perizinan
 - .62 Prasarana (Stasiun, Pintu Lintasan, Signal, Jalan/Jembatan)
 - .63 Sarana Meliputi : Lokomotif, Gerbong, Bogie
 - .64 Angkutan Penumpang
 - .65 Angkutan Barang
 - .66 Keselamatan
 - .67 Trayek
 - .68 Perawatan/Perbaikan
- 552 Perhubungan Laut
 - .1 Lalu Lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum
 - .11 Keamana Lalu Lintas,Rambu-Rambu
 - .12 Pelayaran Dalam Negeri
 - .13 Pelayaran Luar Negeri
 - .14 Pelayaran Charter/Wisata Turis
 - .15 Pelayaran Khusus
 - .2 Perkapalan - Alat Angkutan
 - .21 Kapal Penumpang
 - .22 Kapal Barang
 - .23 Kapal Perang/Patroli/Negara
 - .24 Kapal Tanker
 - .25 Ponton/Tongkang
 - .26 Kapal Layar
 - .27 Kapal Layar Motor
 - .28 Kapal Kontainer

- .3 Pelabuhan /Dermaga
 - .31 Rencana Induk Pelabuhan
 - .32 Tanah/Lokasi
 - .33 Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan Perlengkapan Tambat Labuh
 - .34 Kolam Pelabuhan, Dermaga, Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus
 - .35 Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan
 - .36 Alur Layar
 - .37 Terminal Penumpang
 - .38 Terminal Kontainer, Barang dan Lapangan Penumpukan
 - .39 Bangunan/Gedung/Gudang
- .4 Pengerukan, Reklamasi
 - .41 Alur Pelayaran
 - .42 Kolam Pelabuhan
 - .43 Reklamasi Pantai
 - .44 Dumping Area
 - .45 Pekerjaan Bawah Air (Salvage)
- .5 Penjagaan Pantai
 - .51 Patroli Bandar
 - .52 Patroli Perairan
 - .53 Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
- .7 Keselamatan
 - .71 Rambu-rambu/Mercusuar
 - .72 Kelaikan Kapal/Pembangunan Kapal
 - .73 Fasilitas Keselamatan/Keamanan
 - .74 Telekomunikasi Pelayaran
 - .75 Sertifikasi Kesempurnaan Kapal
 - .76 Sertifikasi Awak Kapal
- .8 Kecelakaan, Gangguan
 - .81 Kecelakaan Penumpang/Kapal
 - .82 Kecelakaan Barang
 - .83 Gangguan Sarana/Prasarana
 - .84 Pembajakan/Penyeludupan
 - .85 Pencemaran
- .9 Perijinan
 - .91 Ijin Berlayar
 - .92 Ijin Pekerjaan Bawah Air
 - .93 Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal
 - .94 Ijin Pembukaan Kantor Cabang
 - .95 Ijin Usaha Angkutan Laut
 - .96 Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut
 - .97 Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan
 - .98 Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
 - .99 Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
- 553 Perhubungan Udara
 - .1 Lalu Lintas Udara/ Keamanan Lalu Lintas Udara
 - .11 Penerbangan Domestik

.12 Penerbangan Luar Negeri

- 38 -

.13 Penerbangan Haji
.14 Penerbangan Charter/Non Reguler
.15 Penerbangan Khusus/Jembatan Udara

.2 Pelabuhan Udara

.21 Tanah/Lokasi

.22 Landasan

.23 Apron

.24 Terminal Penumpang

.25 Terminal Cargo

.26 Bangunan/Gedung

.27 Perlengkapan

.28 Parkir Kendaraan

.29 Helipad

.3 Alat Angkutan

.31 Pesawat Udara

.32 Helikopter

.33 Angkutan Barang

.4 Sertifikasi Kelaikan

.41 Kelaikan Pesawat Udara

.42 Kelaikan Peralatan Penunjang

.43 Kelaikan Personil/Awak Kapal

.5 Keamanan dan Keselamatan

.51 Rambu-rambu

.52 Perakitan/Kalibrasi

.53 Fasilitas Keselamatan

.6 Kecelakaan / Gangguan

.7 Perizinan

554 Pos

.1 Muatan Dalam Negeri

.2 Muatan Luar Negeri

.3 Expedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)

555 Telekomunikasi

.1 Telepon

.2 Telegram

.3 Telex/SSB, Faximile

.4 Satelit, Internet

.5 Stasiun Bumi, Parabola

.6 Radio Kumunikasi

556 Pariwisata dan Rekreasi

.1 Objek Kepariwisataaan Taman Mini Indonesia Indah

.2 Perhotelan / Pondok Wisata

.21 Status Hotel

.22 Kelas Hotel

.23 Tarif

.3 Travel Service

.31 Pramuwisata

.32 Biro Perjalanan / Angkutan Wisata

.33 Souvenir

.34 Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)

.35 Mandala Wisata



- .4 Tempat Rekreasi
- .41 Obyek dan Daya Tarik Wisata
- .42 Rehabilitasi / Perawatan
- .43 Pengembangan Fasilitas
- .44 Tanah / Bangunan
- .45 Bina Usaha
- .46 Institusi
- .5 Perizinan
- .6 Wisatawan
- .61 Wisatawan Nusantara
- .62 Wisatawan Mancanegara
- .7 Promosi dan Informasi Pariwisata
- .71 Dalam Negeri
- .72 Luar Negeri
- 557 Meteorologi
- .1 Ramalan Cuaca
- .2 Curah Hujan
- .3 Kemarau Panjang
- .4 Hujan Buatan
- .5 Peneropongan Bintang
- 560 TENAGA KERJA**
- .1 Pengangguran
- .2 Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- .3 Perencanaan Ketenagakerjaan
- .4 Data dan Informasi Ketenagakerjaan
- .5 Penilikan dan Kajian Kebijakan Ketenagakerjaan
- .6 Pasar Kerja (Persyaratan Kerja)
- .7 Kesejahteraan Pekerja
- 561 Upah
- .1 Standarisasi Pengupahan
- .2 Fasilitasi Pengupahan
- .3 Pengembangan Pengupahan
- 562 Penempatan Tenaga Kerja, TKI
- .1 Penempatan TKI / TKW dalam Negeri
- .2 Penempatan TKI / TKW luar Negeri
- .3 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- .4 Kerjasama antar negara
- 563 Latihan Kerja
- .1 Kompetensi dan Pelatihan Kerja
Meliputi : Program dan Materi Latihan Kerja,
Penyelenggaraan latihan kerja, Standarisasi kompetensi
- .2 Kelembagaan Pelatihan
Meliputi : Standar Mutu, Izin dan Akreditasi Lembaga,
Sarana dan Prasarana Pelatihan, Kemitraan dan Pendanaan)
- .3 Instruktur dan Tenaga Pelatihan
Meliputi : Instruktur Pemerintah, Instruktur Swasta, Tenaga
Pelatihan Pemerintah, Tenaga Pelatihan Swasta)
- .4 Pemagangan Dalam Negeri
- .5 Pemagangan Luar Negeri

- 564 Tenaga Kerja
 - .1 Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia (BUTSI)
 - .2 Padat Karya
- 565 Perselisihan perburuhan /Tenaga kerja
 - .1 Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
 - .2 Mogok / Unjuk Rasa Tenaga Kerja
- 566 Keselamatan Kerja
 - .1 Instalasi Proteksi Kebakaran
 - .2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
 - .3 Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam Bekerja
 - .4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan
 - .5 Pelatihan / Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
 - .6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
 - .7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
 - .8 Perlengkapan Sarana Kerja
 - .9 Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (Shift Malam)
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
 - .1 Pengaduan PHK Sepihak
 - .2 PHK Massal
 - .3 Bantuan Hukum bagi Pekerja yang di PHK
 - .4 Ijin Melakukan PHK
 - .5 Perhitungan Masa Kerja bagi Pekerja yang di PHK
 - .6 Pemberian Uang Tunggu bagi Pekerja yang Di PHK
 - .7 Pemberian Uang Pesangon bagi Pekerja yang di PHK
- 568 Kesejahteraan Buruh / Pekerja
 - .1 Bantuan Kredit / bantuan Modal Kerja bagi Naker
 - .2 Perumahan Pekerja
 - .3 Keikutsertaan Pekerja dalam Program Jamsostek
 - .4 Koperasi Pekerja
 - .5 Sarana Transportasi Pekerja
 - .6 Perpustakaan Pekerja
 - .7 Tempat Ibadah Pekerja
 - .8 Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
 - .9 Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerjaan
- 569 Tenaga Kerja Orang Asing
 - .1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
 - .2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 - .3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
 - .4 Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
 - .5 Data Tenaga Kerja Asing
 - .6 Kecelakaan / Kematian Tenaga Kerja Asing
 - .7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
 - .8 Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
 - .9 Tenaga Kerja Asing Ilegal
- 570 PENANAMAN MODAL**
- 571 Modal Domestik
- 572 Modal Asing
- 573 Modal Patungan (Joint venture)
- 574 Pasar Uang dan Modal
- 575 Saham, Bursa Efek
- 576 Belanja modal

580 PERBANKAN MONETER

- .1 Bank Pemerintah
- .2 Bank Swasta
- 581 Kredit
 - .1 Kredit Makro
 - .2 Kredit Mikro
- 582 Investasi
- 583 Pembukaan, Perubahan, Penutupan Rekening, Deposito
 - .1 Syariah
 - .2 Konvensional
- 584 Bank Pembangunan Daerah
 - .1 Bank Aceh
 - .2 BPR Mustaqim dan BPR Swasta
- 585 Asuransi, Dana Kecelakaan Lalu Lintas
- 586 Alat Pembayaran, cek, giro wesel, transfer
- 587 Fiskal
- 588 Hutang Negara
- 589 Moneter

590 AGRARIA

- .1 Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
- 591 Tata Guna Tanah
 - .1 Pemetaan dan Pengukuran
 - .2 Perpetaan
 - .3 Penyediaan Data
 - .4 Fatwa Tata Guna Tanah
 - .5 Tanah Kritis
- 592 Landreform
 - .1 Redistribusi
 - .11 Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian
 - .12 Penentuan Tanah Objek Landreform
 - .13 Pembagian Tanah Landreform
 - .14 Sengketa Redistribusi Tanah Objek Landreform
 - .2 Ganti Rugi
 - .21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan
Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
 - .22 Ganti Rugi Tanah Absentee
Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
 - .23 Ganti Rugi Tanah Partikelir
Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
 - .3 Bagi Hasil
 - .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil
 - .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
 - .33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
 - .4 Gadai Tanah
 - .41 Pendaftaran Pelaksanaan Gadai tanah
 - .42 Pelaksanaan Gadai Tanah
 - .43 Sengketa Gadai Tanah
 - .44 Hukum Gadai
 - .5 Bimbingan dan Penyuluhan
 - .6 Pengembangan
 - .7 Yayasan Dana Landreform (YDL)

- 593 Pengurusan Hak-hak Tanah
 - .1 Sewa Tanah
 - .11 Sewa Tanah untuk Tanaman Tertentu : Tebu, Tembakau rosela, Corchorus
 - .2 Hak Milik
 - .21 Perorangan
 - .22 Badan Hukum
 - .3 Hak Pakai
 - .31 Perorangan
 - .311 Warga Negara Indonesia
 - .312 Warga Negara Asing
 - .32 Badan Hukum
 - .321 Badan Hukum Indonesia
 - .322 Badan Hukum Asing, Kedutaan Konsulat, Kantor Dagang Asing
 - .33 Tanah Gedung - Gedung Negara
 - .4 Guna Usaha
 - .41 Perkebunan Besar
 - .42 Perkebunan Rakyat
 - .43 Peternakan
 - .44 Perikanan
 - .45 Kehutanan
 - .46 Kelautan
 - .5 Hak Guna Bangunan
 - .51 Perorangan
 - .52 Badan Hukum
 - .53 P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda)
 - .54 Badan Hukum Asing Belanda - PBK No. 5 / 56
 - .55 Pemulihan Hak (Pen Pres 4 / 1960)
 - .6 Hak Pengelolaan
 - .61 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate
 - .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
 - .7 Sengketa tanah
 - .71 Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)
 - .8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
 - .81 Pencabutan Hak
 - .82 Pembebasan Tanah
 - .83 Ganti Rugi Tanah
- 594 Pendaftaran Tanah
 - .1 Pengukuran / Pemetaan
 - .11 Fotogrametri
 - .12 Terristris
 - .13 Triangulasi
 - .14 Peralatan
 - .2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 61 / 1965)
 - .3 Sertifikat
 - .4 Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)
- 595 Lahan Transmigrasi
 - .1 Tata Guna Tanah
 - .2 Landreform
 - .3 Pengurusan Hak-hak Tanah
 - .4 Pendaftaran Tanah

- 596 -
- 597 -
- 598 -
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN**
- 601 Tata Bangunan Konstruksi dan Industri Konstruksi
- 602 Kontraktor Pemborong
 - .1 Tender
 - .2 Penunjukan
 - .3 Prakuafifikasi
 - .31 Daftar Rekanan Mampu (DRM)
 - .32 Tanda Daftar Rekanan (TDR)
- 603 Arsitektur
- 604 Bahan Bangunan
 - .1 Tanah dan Batu seperti Batu belah, Steen Slaag, Split dsb
 - .2 Aspal, Aspal Buatan, Aspal Alam (Butas)
 - .3 Besi dan logam lainnya
 - .31 Besi beton
 - .32 Besi Profil (konstruksi)
 - .33 Paku
 - .34 Alumunium Profil
 - .4 Bahan-bahan pelindung dan pengawet (cat, tekstil, Pengawet kayu)
 - .5 S e m e n
 - .6 K a y u
 - .7 Bahan penutup Atap (Genting, Asbes Gelombang, Seng dsb)
 - .8 Alat-alat penggantung dan pengunci
 - .9 Bahan-bahan bangunan lainnya
- 605 I n s t a l a s i
 - .1 Instalasi bangunan
 - .2 Instalasi listrik
 - .3 Instalasi air/sanitasi
 - .4 Instalasi pengatur udara
 - .5 Instalasi akustik
 - .6 Instalasi cahaya/penerangan
- 606 Konstruksi pencegahan
 - .1 Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran
 - .2 Konstruksi pencegahan terhadap gempa
 - .3 Konstruksi pencegahan terhadap angin/udara/panas
 - .4 Konstruksi pencegahan terhadap Kegaduhan
 - .5 Konstruksi pencegahan terhadap gas/explosive
 - .6 Konstruksi pencegahan terhadap serangga
 - .7 Konstruksi pencegahan terhadap radiasi atom
- 610 PENGAIRAN**
- 611 Irigasi
 - .1 Bangunan Waduk
 - .11 Bendungan
 - .12 Tanggul
 - .13 Pelimpahan Banjir
 - .14 Menara Pengambilan
 - .15 Pintu Air
 - .2 Bangunan Pengambilan
 - .21 Bendungan
 - .22 Bendungan dengan pintu bilas

.23	Bendungan dengan pompa
.24	Pengambilan bebas
.25	Pengambilan bebas dengan pompa
.26	Sumur dengan pompa
.27	Kantung Lumpur
.28	Silt Ekstraktor
.29	Escape Channel
.3	Bangunan pembawa
.31	Saluran
.311	Saluran Induk
.312	Saluran Sekunder
.313	Suplesi
.314	Tersier
.315	Saluran Kwarter
.316	Saluran Pasangan
.317	Saluran Tertutup/Terowongan
.32	Bangunan
.321	Bangunan Bagi
.322	Bangunan Bagi dan sadap
.323	Bangunan sadap
.324	Bangunan Chek
.325	Bangunan Terjun
.33	Box tersier
.34	Got miring
.35	Talang
.36	Syphon
.37	Gorong - gorong
.38	Pelimpahan samping
.4	Bangunan Pembuang
.41	Saluran
.411	Saluran Pembuang Induk
.412	Saluran Pembuang Sekunder
.413	Saluran Pembuang Tersier
.42	Bangunan
.421	Bangunan Out Let
.422	Bangunan Terjun
.423	Bangunan Penahan Banjir
.43	Gorong - gorong pembuang
.44	Talang pembuang
.45	Syphon pembuang
.5	Bangunan lainnya
.51	Jalan
.511	Jalan Inpeksi
.512	Jalan Logistik Waduk Lapangan
.52	Jembatan
.521	Jembatan inpeksi
.522	Jembatan Hewan
.53	Tangga Cuci
.54	Kubangan kerbau
.55	Waduk lapangan
.56	Bangunan penunjang
.57	Jaringan telepon
.58	Stasiun Agro

- 612 Folder
 - .1 Tanggul Keliling
 - .11 Tanggul
 - .12 Bangunan Penutup Sungai
 - .13 Jembatan
 - .2 Bangunan Pembawa
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran Muka
 - .212 Saluran Pembawa Waduk
 - .213 Saluran Pembawa Sekunder
 - .22 Stasiun Pompa Pemasukan
 - .23 Bangunan bagi :
 - .24 Gorong - gorong
 - .25 Syphon
 - .3 Bangunan Pembuang
 - .31 Stasiun Pompa Pembuangan atau Pembuang
 - .32 Saluran
 - .321 Saluran Pembuang Induk
 - .322 Saluran Pembuang Sekunder
 - .33 Pintu air pembuangan
 - .34 Gotong - gorong pembuangan
 - .35 Syphon pembuangan
 - .4 Bangunan lainnya
 - .41 Bangunan
 - .411 Bangunan Pengukur Air
 - .412 Bangunan Pengukur Curan Hujan
 - .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
 - .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
 - .42 Rumah petugas eksploitasi
- 613 Pasang surut
 - .1 Bangunan pembawa
 - .11 Saluran
 - .111 Saluran Pembawa Induk
 - .112 Saluran Pembawa Sekunder
 - .113 Saluran Pembawa Tersier
 - .114 Saluran Penyimpanan Air
 - .12 Bangunan pintu pemasukan
 - .2 Bangunan Pembuang
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran Pembuang Induk
 - .212 Saluran Pembuang Sekunder
 - .213 Saluran Pembuang Tersier
 - .214 Saluran Pengumpul Air
 - .22 Bangunan pintu pembuang
 - .3 Bangunan lainnya
 - .31 Kolom pasang
 - .32 Saluran
 - .321 Saluran Lalu Lintas
 - .322 Saluran Muka
 - .33 Bangunan
 - .331 Bangunan Penangkis Kotoran
 - .332 Bangunan Pengukur Muka Air
 - .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan

- .34 Jalan
- .35 Jembatan
- 614 Pengendalian sungai
 - .1 Bangunan pengaman
 - .11 Tanggul banjir
 - .12 Pintu pengatur banjir
 - .13 Klep pengatur banjir
 - .14 Tembok pengaman talut
 - .15 Krib
 - .16 Kantung Lumpur
 - .17 Check Dam
 - .18 Syphon
 - .2 Saluran pengaman
 - .21 Saluran banjir
 - .22 Saluran Drainase
 - .23 Corepure
 - .3 Bangunan lainnya
 - .31 Warning system
 - .32 Stasiun
 - .321 Stasiun Pengukur Curah Hujan
 - .322 *Stasiun Pengukur Air*
 - .323 Stasiun Pengukur Cuaca
 - .324 Stasiun Pos Penjagaan
- 615 Pengaman Pantai
 - .1 Tanggul
 - .2 K r i b
 - .3 Bangunan lainnya
- 616 Air tanah
 - .1 Stasiun Pompa
 - .2 Bangunan Pembawa
 - .3 Bangunan Pembuangan
 - .4 Bangunan lainnya
- 617 -
- 618 -
- 619 -
- 620 J A L A N**
 - .1 Jalan Nasional
 - .2 Jalan Provinsi
 - .3 Jalan Kabupaten/Kota
- 621 Jalan Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
 - .11 Tanah
 - .12 Tanaman
 - .13 Bangunan
 - .2 Bangunan Sementara
 - .21 Jalan Sementara
 - .22 Jembatan Sementara
 - .23 Kantor Proyek
 - .24 Gudang Proyek
 - .25 Barak Kerja
 - .26 Laboratorium Lapangan
 - .27 Rumah
 - .3 Badan jalan

.31	Pekerjaan tanah (earth work)
.32	Stabilisasi
.4	Perkerasan
.41	Lapisan pondasi bawah
.42	Lapisan pondasi
.43	Lapisan permukaan
.5	Drainase
.51	Parit tanah
.52	Gorong - gorong (culvert)
.6	Buku Trotoir
.61	Tanah
.62	Perkerasan
.63	Pasangan
.7	Median
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Perkerasan
.74	Pasangan
.8	Daerah Samping
.81	Tanaman
.82	Pagar
.9	Bangunan pelengkap dan pengamanan
.91	Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas
.92	Lampu penerangan
.93	Lampu pengaturan lalu lintas
.94	Patok - patok KM
.95	Patok - patok R.O.W (sempadan)
.96	Rel pengamanan
.97	Pagar
.98	Turap penahan
.99	Bronjong
622	Jalan Luar Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Badan jalan
.31	Pekerjaan tanah (earth work)
.32	Stabilisasi
.4	Perkerasan
.41	Lapis pondasi
.42	Lapis Pondasi bawah
.43	Lapis permukaan

.5	Drainase
.51	Parit
.52	Gorong - gorong (culvert)
.53	Sub drainase
.6	Trotoar
.61	Tanah
.62	Perkerasan
.7	Median
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Perkerasan
.74	Pasangan
.8	Daerah Sampingan
.81	Tanaman
.82	Pagar
.9	Bangunan perlengkapan dan pengamanan
.91	Rambu - rambu / Tanda -tanda Lalu lintas
.92	Lampu penerangan
.93	Lampu pengatur lalu lintas
.94	Patok - patok KM
.95	Patok - patok R.O.W (sempadan)
.96	Rel pengamanan
.97	Pagar
.98	Turap penahan
.99	Bronjong
623	Jalan Layang
624	-
625	-
630	JEMBATAN
631	Jembatan pada jalan Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.22	Jalan Sementara
.23	Jembatan Sementara
.24	Kantor Proyek
.25	Gudang proyek
.26	Barak Kerja
.27	Laboratorium Lapangan
.28	Rumah
.3	Pekerjaan tanah (Earth Work)
.31	Galian tanah
.32	Timbunan tanah
.4	Pondasi
.41	Pondasi kepala jembatan
.42	Pondasi pilar
.43	Angker
.5	Bangunan bawah
.51	Kepala Jembatan
.52	Pilar
.53	Piloon
.54	Landasan

.6	Bangunan
.61	Gelagar
.62	Lantai
.63	Perkerasan
.64	Jalan orang / trotoar
.65	Sandaran
.66	Talang air
.7	Bangunan / pengaman
.71	Turap penahan
.72	Bronjong
.73	Strek Dam
.74	Kist Dam
.75	Coupure
.76	Krib
.8	Bangunan Pelengkap
.81	Rambu - rambu / tanda - tanda lalu lintas
.82	Lampu penerangan
.83	Lampu lalu lintas
.84	Patok - patok KM
.85	Patok - patok ROW
.86	Rel pengaman
.87	Pagar
.9	Oprit
.91	Badan
.92	Perkerasan
.93	Drainase
.94	Baku
.95	Median
632	Jembatan pada Jalan Luar Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Pekerjaan tanah (earth work)
.31	Galian tanah
.32	Timbunan tanah
.4	Pondasi
.41	Pondasi kepala jembatan
.42	Pondasi pilar
.43	Pondasi angker
.5	Bangunan bawah
.51	Kepala Jembatan
.52	Pilar

- .53 Pilon
- .54 Landasan
- .6 Bangunan atas
- .61 Gelagar
- .62 Lantai
- .63 Perkerasan
- .64 Jalan orang / trotoar
- .65 Sandaran
- .66 Talang air
- .7 Bangunan Pengaman
- .71 Turap / penahan
- .72 Bronjong
- .73 Strek Dam
- .74 Kist Dam
- .75 Corepure
- .76 Krib
- .8 Bangunan pelengkap
- .81 Rambu - rambu / tanda - tanda lalu lintas
- .82 Lampu penerangan
- .83 Lampu Lalu - lintas
- .84 Patok - patok Pengaman
- .85 Patok - patok ROW (Sempadan)
- .86 Pagar
- .9 Oprit
- .91 Badan
- .92 Perkerasan
- .93 Drainase
- .94 Baku
- .95 Median
- 633 Jembatan gantung
- 640 BANGUNAN**
- 641 Bangunan Pemerintah
 - .1 Gedung Pengadilan
 - .2 Rumah Pejabat Negara
 - .3 Gedung DPR
 - .4 Gedung Balai Kota
 - .5 Penjara
 - .6 Perkantoran
- 642 Bangunan Pendidikan
 - .1 Taman Kanak-kanak
 - .2 SD & Sekolah Menengah
 - .3 Perguruan Tinggi
- 643 Bangunan Rekreasi
 - .1 Bangunan Olah Raga
 - .2 Gedung Kesenian
 - .3 Gedung Pemancar
- 644 Bangunan Perdagangan
 - .1 Pusat Perbelanjaan
 - .2 Gedung Perdagangan
 - .3 B a n k
 - .4 Perkantoran

- 645 Bangunan Pelayanan Umum
 - .1 Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum
 - .2 Gedung Parkir
 - .3 Rumah Sakit
 - .4 Gedung Telkom
 - .5 Terminal Angkutan Udara
 - .6 Terminal Angkutan Air
 - .7 Terminal Angkutan Darat/ Halte
 - .8 Bangunan Keagamaan
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
 - .1 Monumen
 - .2 Candi
 - .3 Kraton
 - .4 Rumah Tradisional
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
 - .1 Rumah Perkotaan
 - .11 Inti / sederhana
 - .12 Sedang / Mewah
 - .2 Rumah Pedesaan
 - .21 Rumah Contoh
 - .3 Real Estate
 - .4 Bapetarum / Tapera
- 649 Elemen Bangunan
 - .1 Pondasi
 - .11 Diatas Tiang
 - .2 Dinding
 - .21 Penahan beban
 - .22 Tidak menahan beban
 - .3 A t a p
 - .4 Lantai / langit-langit
 - .41 Suspended
 - .42 Soli
t
 - .5 Pintu / Jendela
 - .51 Pintu Harmonik
 - .52 Pintu biasa
 - .53 Pintu sorong
 - .54 Jendela biasa
 - .55 Jendela sorong
 - .56 Jendela vertikal
- 650 TATA KOTA**
- 651 Daerah Perdagangan / pelabuhan
 - .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
 - .2 Daerah Perkotaan
- 652 Daerah Pemerintah
- 653 Daerah Perumahan (site & service)
 - .1 Kepadatan Rendah (low density)
 - .2 Kepadatan Tinggi (high density)
- 654 Daerah Industri
 - .1 Industri Berat
 - .2 Industri Ringan
 - .3 Industri Rumah (home industri)

- 655 Daerah Rekreasi
 - .1 Taman Kota (Public Garden)
 - .2 Tempat Olahraga dan bermain (Sport & Playing Fields)
 - .3 Ruang terbuka (Open Space)
- 656 Transportasi
 - .1 Jaringan jalan
 - .11 Penerangan Jalan
 - .2 Jaringan Kereta Api
 - .3 Jaringan Sungai
- 657 Saluran Air Kotor atau Saluran Air Hujan (Assainering)
 - .1 Saluran Pengumpulan
 - .2 Instalasi Pengolahan
 - .21 Bangunan
 - .211 Bangunan Penyaringan
 - .212 Bangunan Penghancur Kotoran/Sampah
 - .213 Bangunan Pengendap
 - .214 Bangunan Pengereng Lumpur
 - .22 Unit Disinfektan
 - .23 Unit Perpompaan
- 658 Kesehatan Lingkungan
 - .1 Persampahan
 - .11 Bangunan Pengumpulan
 - .12 Bangunan Pemusnahan
 - .2 Pengotoran Udara
 - .3 Pengotoran Air
 - .31 Air Buangan Industri Limbah
 - .4 Kegaduhan
 - .5 Kebersihan kota
- 659 -
- 660 TATA LINGKUNGAN**
 - .1 Lingkungan Hidup
 - .2 Kebersihan Lingkungan
 - .3 Pencemaran
 - .31 Pencemaran Air
 - .32 Pencemaran Udara
- 661 Daerah Hutan
- 662 Daerah Pertanian/Perkebunan
- 663 Daerah Pemukiman
- 664 Pusat Pertumbuhan
- 665 Transportasi
 - .1 Jaringan jalan
 - .2 Jaringan kereta api
 - .3 Jaringan Sungai
- 666 -
- 667 -
- 668 -
- 670 KETENAGAAN**
 - .1 Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
- 671 Listrik
 - .1 Kelistrikan
 - .11 Kelistrikan PLN
 - .12 Kelistrikan non PLN

- .2 Pembangkit Tenaga Listrik
- .21 PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
- .22 PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
- .23 PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas
- .24 PLTS - Pembangkit Listrik Tenaga Surya
- .25 PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
- .26 PLTPB - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
- .27 PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
- .28 PLTB - Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
- .29 PLTO - Pembangkit Listrik Tenaga Ombak
- .3 Transmisi Tenaga Listrik
- .31 Gardu Induk / gardu penghubung / gardu trafo
- .32 Saluran Udara tegangan tinggi
- .33 Kabel Bawah Tanah
- .4 Distribusi Tenaga Listrik
- .41 Gardu Distribusi
- .42 Tegangan Rendah
- .43 Tegangan Menengah
- .44 Jaringan Bawah Tanah
- .5 Pengusahaan Listrik
- .51 Sambungan Listrik
- .52 Penjualan Tenaga Listrik
- .53 Tarif Listrik
- 672 -
- 673 -
- 674 -
- 680 PERALATAN**
- 681 -
- 682 -
- 683 -
- 690 AIR MINUM**
- 691 Intake
 - .1 Broncaptering
 - .2 Sumur
 - .3 Bendungan
 - .4 Saringan (screen)
 - .5 Pintu air
 - .6 Saluran Pembawa
 - .7 Alat ukur
 - .8 Perpompaan
- 692 Transmisi Air Baku
 - .1 Perpipaan
 - .2 Katup Udara (Air Relief Valve)
 - .3 Katup penguras (Blow Oof Valve)
 - .4 Bak Pelepas tekanan
 - .5 Jembatan pipa
 - .6 Syphon
- 693 Instalasi Pengelolaan
 - .1 Bangunan ukur
 - .2 Bangunan Aerasi
 - .3 Bangunan Pengendapan

- .4 Bangunan Pembubuh bahan kimia
- .5 Bangunan Pengaduk
- .6 Bangunan Saringan
- .7 Perpompaan
- .8 Clear Hell
- 694 Distribusi
 - .1 Reservoir menara bawah tanah
 - .11 Menara
 - .12 Reservoir di bawah tanah
 - .2 Perpipaan
 - .3 Perpompaan
 - .4 Jembatan pipa
 - .5 syphon
 - .6 Hydran
 - .61 Hydran Umum
 - .62 Hydran Kebakaran
 - .7 Katup
 - .71 Katup Udara (Air Relief Valve)
 - .72 Katup pelepas (Blow Off Valve)
 - .8 Bak pelepas tekanan (Pressuer Reducing Valve)
- 694 -
- 695 -
- 696 -

700 PENGAWASAN

- .1 Kebijakan dan program pengawasan
- .2 Pengawasan perencanaan pengadaan / proyek
- 701 Bidang urusan dalam
- 702 Bidang Peralatan
- 703 Bidang Kekayaan Daerah
- 704 Bidang Perpustakaan / Dokumentasi / Kearsipan / Sandi
- 705 Bidang perencanaan
- 706 Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan
- 707 Bidang Penelitian
- 708 Bidang Konferensi
- 709 Bidang Perjalanan Dinas

710 BIDANG PEMERINTAHAN

- 711 Bidang Pemerintahan Pusat
- 712 Bidang Pemerintahan Provinsi
- 713 Bidang Pemerintahan Kabupaten / Kota
- 714 Bidang Pemerintahan Desa / Gampong
- 715 Bidang MPR/DPR/DPD
- 716 Bidang DPRA
- 717 Bidang DPRK
- 718 Bidang Hukum
- 719 Bidang Hubungan Luar Negeri

720 BIDANG POLITIK

- 721 Bidang Kepartaian
- 722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- 723 Bidang Organisasi profesi dan fungsional
- 724 Bidang Organisasi Pemuda
- 725 Bidang Organisasi Buruh, tani dan nelayan
- 726 Bidang Organisasi Wanita
- 727 Bidang Pemilihan Umum

730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN

- 731 Bidang Pertahanan
- 732 Bidang Kemiliteran
- 733 Bidang Perlindungan Masyarakat
- 734 Bidang Keamanan
- 735 Bidang Kejahatan
- 736 Bidang Kebencanaan
- 737 Bidang Kecelakaan

740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 741 Bidang Pembangunan Desa / Gampong
- 742 Bidang Pendidikan
- 743 Bidang Kebudayaan
- 744 Bidang Kesehatan
- 745 Bidang Agama
- 746 Bidang Sosial
- 747 Bidang Kependudukan
- 748 Bidang Media Massa
- 749 -

750 BIDANG PEREKONOMIAN

- 751 Bidang Perdagangan
- 752 Bidang Pertanian
- 753 Bidang Perindustrian
- 754 Bidang Pertambangan / kesamuderaan
- 755 Bidang Perhubungan
- 756 Bidang Tenaga Kerja
- 757 Bidang Permodalan/Investasi
- 758 Bidang Perbankan / Moneter
- 759 Bidang Pertanahan / Agraria

760 BIDANG PEKERJAAN UMUM

- 761 Bidang Pengairan
- 762 Bidang Jalan
- 763 Bidang Jembatan
- 764 Bidang Bangunan
- 765 Bidang Tata Kota
- 766 Bidang Lingkungan
- 767 Bidang Ketenagaan
- 768 Bidang Peralatan
- 769 Bidang Air Minum
- 770 -

780 BIDANG KEPEGAWAIAN

- 781 Bidang Pengadaan ASN
- 782 Bidang Mutasi pegawai
- 783 Bidang kedudukan pegawai
- 784 Bidang kesejahteraan pegawai
- 785 Bidang Cuti
- 786 Bidang penilaian
- 787 Bidang tata usaha kepegawaian
- 788 Bidang pemberhentian pegawai
- 789 Bidang pendidikan pegawai

790 BIDANG KEUANGAN

- 791 Bidang Anggaran
- 792 Bidang otorisasi



- 793 Bidang Verifikasi
- 794 Bidang Pembukuan
- 795 Bidang Perbendaharaan
- 796 Bidang pembinaan kebidaharaan
- 797 Bidang Pendapatan
- 798 Bidang bendaharawan
- 799 -

800 KEPEGAWAIAN

Klasifikasi disini: Kebijakan Kepegawaian

- .1 Perencanaan
- .2 Penelitian
- 3. Pengaduan
- 4. Tim
- 5. Statistik
- 6. Peraturan perundang-undangan

810 PENGADAAN

Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan dan Pengangkatan Calon Pegawai

811 Lamaran

- .1 Testing
- .2 Screening
- .3 Pemanggilan

812 Pengujian Kesehatan

813 Pengangkatan CPNS

- .1 Pengangkatan CPNS Golongan I
- .2 Pengangkatan CPNS Golongan II
- .3 Pengangkatan CPNS Golongan III
- .4 Pengangkatan CPNS Golongan IV
- .5 Pengangkatan Calon Guru Inpres

814 Pengangkatan Tenaga Lepas

- .1 Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak
- .2 Pengangkatan Tenaga Harian
- .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan

815 Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

816 -

817 -

820 MUTASI

Meliputi : Pengangkatan, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, Pemindahan, Pelimpahan, Datasering, Tugas Belajar dan Wajib Militer

821 Pengangkatan

- .1 Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tetap
 - .11 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
 - .12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
 - .13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III
 - .14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV
 - .15 Pengangkatan Kembali pegawai negeri sipil yang cuti di luar tanggungan negara
- .2 Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan.
 - .21 Sekjen/Dirjen/Irjen/Kaban
 - .22 Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/Sekretaris/Kepala Dinas/Badan/Asisten Sekda

- .23 Kepala bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang/
Inspektur Pembantu
- .24 Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang
Pemeriksa (Auditor)
- .25 Camat
- .26 Lurah
- .27 Jabatan lainnya
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
 - .1 PNS Golongan I
 - .2 PNS Golongan II
 - .3 PNS Golongan III
 - .4 PNS Golongan IV
- 823 Kenaikan Pangkat
 - .1 PNS Golongan I
 - .2 PNS Golongan II
 - .3 PNS Golongan III
 - .4 PNS Golongan IV
- 824 Pemindahan / Pelimpahan / Pembantuan
 - .1 PNS Golongan I
 - .2 PNS Golongan II
 - .3 PNS Golongan III
 - .4 PNS Golongan IV
 - .5 Lolos Butuh (Mutasi Pegawai dari Instansi Lain)
- 825 Datasering dan Penempatan Kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
 - .1 Dalam Negeri
 - .2 Luar Negeri
 - .3 Tunjangan Belajar
 - .4 Penempatan Kembali
- 827 Wajib Militer
- 828 Mutasi Pegawai Instansi Lainnya
- 829 -
- 830 KEDUDUKAN**
Meliputi : Perhitungan masa kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji,
Penghargaan Ijazah dan jenjang Pangkat
- 831 Perhitungan masa kerja
- 832 Penyesuaian Pangkat / Gaji
 - .1 PNS Golongan I
 - .2 PNS Golongan II
 - .3 PNS Golongan III
 - .4 PNS Golongan IV
- 833 Penghargaan Ijazah / Penyesuaian ijazah
- 834 Jenjang Pangkat/Eselonering
- 835 -
- 836 -
- 837 -
- 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI**
Meliputi : Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Distribusi/Koperasi
Perumahan/ Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi dan Dispensasi
- 841 Tunjangan
 - .1 Jabatan
 - .2 Kehormatan

- .3 Dana Kematian (uang duka)
- .4 Tunjangan Hari Raya
- .5 Perjalanan Dinas Tetap / Cuti / Pindah
- .6 Keluarga
- .7 Pangan, Sandang, Papan (Bapetarum/ Tapera)
- 842 Dana
 - .1 Taspen
 - .2 Kesehatan
 - .3 Asuransi
 - .4 Pendidikan
- 843 Perawatan kesehatan
 - .1 Poliklinik
 - .2 Perawatan Dokter
 - .3 Obat-obatan
 - .4 Keluarga Berencana
- 844 Distribusi/ Koperasi
 - .1 Distribusi Pangan
 - .2 Distribusi Sandang
 - .3 Distribusi Papan
 - .4 Distribusi Lainnya
- 845 Perumahan/ Tanah
 - .1 Perumahan Pegawai
 - .2 Tanah Kapling
 - .3 Losmen/Hotel (Lihat 556 .2)
 - .4 Wisma, Mess
- 846 Bantuan Sosial
 - .1 Bantuan kebakaran
 - .2 Bantuan banjir
 - .3 Bantuan Bencana lainnya
- 847 Rekreasi, Wisata Eksekutif
- 848 Dispensasi
- 849 Outbond
- 850 C U T I**
Meliputi: Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji/ Umrah, Cuti diluar Tanggungan Negara, dan Cuti Alasan Lainnya
- 851 Cuti Tahunan
- 852 Cuti Besar
- 853 Cuti Sakit
- 854 Cuti Hamil
- 855 Cuti Naik Haji/Umrah
- 856 Cuti Diluar Tanggungan Negara
- 857 Cuti Alasan Lain/Cuti Alasan Penting
- 858 -
- 859 -
- 860 PENILAIAN**
Meliputi : Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas, Penilaian Kekayaan, Pribadi dan Rehabilitasi
- 861 Penghargaan
 - .1 Bintang/Satyalencana
 - .2 Kenaikan Pangkat Anumerta
 - .3 Kenaikan Gaji Istimewa
 - .4 Hadiah Berupa Uang
 - .5 Pegawai Teladan

- 862 Hukuman
- .1 Teguran peringatan
 - .2 Penundaan Kenaikan Gaji
 - .3 Penurunan Pangkat
 - .4 Pemindahan
- Catatan: Pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat lihat 887 dan 888
- 863 Kondite, DP3/SKP, Disiplin Pegawai
- .1 Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK)
 - .2 Daftar Usul Penilaian Kinerja (DUNPK)
 - .3 Penetapan Angka Kredit (PAK)
- 864 Ujian Dinas
- .1 Tingkat I
 - .2 Tingkat II
 - .3 Tingkat III
- 865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri Sipil
Meliputi: Pentunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi (LP2P), LHKPN
- 866 Rehabilitasi/ Pengaktifan kembali
- 867 -
- 868 -
- 869 -
- 870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN**
Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar Riwayat Hidup, Hak, Penggajian, Sumpah/Janji dan Korps Pegawai
- 871 Formasi
- 872 Bezetting / Daftar Urut Kepegawaian
- 873 Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian
- .1 NIP/NRP
 - .2 KARPEG
 - .3 Legitimasi / Tanda Pengenal
 - .4 Daftar Keluarga / Perkawinan, Perceraian, Karis/Karsu
- 874 Daftar Riwayat Pekerjaan
- .1 Tanggal Lahir
 - .2 Penggantian Nama
 - .3 Izin Kepartaian / Organisasi
- 875 Kewenangan Mutasi Kepegawaian
- .1 Pelimpahan Wewenang
 - .2 Spesimen tanda tangan
- 876 Penggajian
- .1 SKPP
- 877 Sumpah / janji
- 878 Korps Kepegawaian
- 879 -
- 880 PEMBERHENTIAN**
Meliputi: Pemberhentian atas permintaan sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon, uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan Hormat.
- 881 Atas Permintaan Sendiri / pengunduran diri
- 882 Dengan hak pensiun
- .1 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Golongan I
 - .2 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Golongan II
 - .3 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Golongan III

- .4 Pemberitahuan dengan Hak Pensiun PNS Golongan IV
- .5 Pensiun Janda / Duda
- .6 Pensiun Yatim Piatu
- .7 Uang muka Pensiun
- 883 Karena meninggal
 - .1 Karena meninggal dalam tugas
- 884 Alasan lain, diantaranya Keuzuran Jasmani
- 885 Uang Pesangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Uang sementara waktu
 - .1 Pembekalan PNS yang akan purna tugas
- 888 Tidak dengan hormat
- 889 -
- 890 PENDIDIKAN PEGAWAI**
Meliputi : Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non Reguler, Pendidikan Keluar Negeri, Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas dan Sarana Pendidikan
- 891 Perencanaan Program dan Pelaporan Diklat
 - .1 Program
 - .2 Kurikulum dan silabus
 - .3 Proposal atau TOR
- 892 Pendidikan Reguler / Kader
 - .1 IPDN / APDN
 - .2 Kursus - kursus reguler
- 893 Pendidikan dan Pelatihan / Non reguler
 - .1 LEMHANAS
 - .2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI/PIM 1, SPAMEN/PIM 2, SPAMA/PIM 3, ADUMLA, ADUM/PIM 4
 - .3 Kursus - kursus / penataran
 - .4 Diklat Teknis, Fungsional dan Manajemen Pemerintahan
 - .5 Diklat Lainnya
- 894 Pendidikan Luar Negeri
 - .1 Berkesinambungan / Berkala / Bergelar
 - .2 Non Gelar / Diploma
- 895 Metode
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Symposium
 - .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
 - .4 Studi Lapangan, KKN / OL, Widya Wisata
 - .5 Tanya jawab/ Silabi/ Modul/Kursil
 - .6 Karya Tulis
 - .7 Penugasan
 - .8 Gladi
- 896 Tenaga Pengajar / widyaiswara / Narasumber
 - .1 Moderator
 - .2 Usul menjadi Tenaga Pengajar
 - .3 Permintaan Tenaga Pengajar
 - .4 Penambahan Tenaga Pengajar
- 897 Administrasi Pendidikan
 - .1 Tahun Pelajaran
 - .2 Persyaratan, pendaftaran, testing, ujian
 - .3 STTP
 - .4 Penilaian Angka Kredit
 - .5 Laporan Pendidikan dan Pelatihan

- 898 Fasilitas Belajar
 - .1 Tunjangan Belajar
 - .2 Asrama
 - .3 Uang Makan
 - .4 Uang Transport
 - .5 Uang Buku
 - .6 Uang Ujian
 - .7 Uang Semester/Uang Kuliah
 - .8 Uang Saku
- 899 Sarana
 - .1 Bantuan Sarana Belajar
 - .2 Bantuan Alat Tulis
 - .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya
- 900 KEUANGAN**
- 901 Nota Keuangan
- 902 APBN
- 903 APBD
- 904 APBN-P
- 905 Dana Alokasi Umum (DAU)
- 906 Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - .1 Alokasi Dana Desa (ADG)
- 907 Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana dari Pusat ke Daerah)
- 908 Dana BOS
- 909 Tunjangan Daerah
- 910 ANGGARAN**
 - .1 Keputusan ttg penunjukkan pengelola keuangan SKPD / PPKD
 - .2 Keputusan Gubernur ttg Penunjukkan Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat teknis BLUD
- 911 Rutin
- 912 Pembangunan
- 913 Anggaran Belanja Tambahan
- 914 Daftar Isian Kegiatan (DIK)
 - .1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
- 915 Daftar Isian Proyek (DIP)
 - .1 Daftar Usulan Proyek (DUP)
 - .2 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
- 916 Revisi Anggaran
- 917 -
- 918 -
- 919 -
- 920 OTORISASI/SKO**
- 921 Rutin
- 922 Pembangunan
- 923 SIAP
- 924 Ralat SKO
- 925 SIAPDA
- 926 -
- 927 -
- 928 -

930 VERIFIKASI

- 931 SPM Rutin (Daftar P8)
- 932 SPM Pembangunan (Daftar P8)
- 933 Penerimaan (Daftar P6, P7)
- 934 SPJ Rutin
- 935 SPJ Pembangunan
- 936 Nota Pemeriksaan
- 937 SP Pemindahan Pembukuan
- 938 -
- 939 -

940 PEMBUKUAN

- 941 Penyusunan Perhitungan Anggaran
- 942 Permintaan Data Anggaran
- 943 Laporan Fisik Pembangunan
- 944 Penata Usahaan Keuangan
- 945 -
- 946 -
- 947 -

950 PERBENDAHARAAN

- 951 Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
- 952 Tuntutan Bendaharawan
- 953 Penghapusan Kekayaan Negara
- 954 Pengangkatan / Penggantian Pemimpin Proyek dan Pengangkatan/
Pemberhentian Bendaharawan
- 955 Specimen Tanda Tangan
- 956 Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan
- 957 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 958 Surat Penolakan Penerbitan (SP2D)
- 959 Daftar Penguji (SP2D)

960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN

- 961 Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas
- 962 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
- 963 Laporan Keuangan Bendaharawan
- 964 -
- 965 -
- 966 -

970 PENDAPATAN

- 971 Perimbangan Keuangan
- 972 Subsidi
- 973 Pajak, Ipeda, IHH, IHPH
- 974 Retribusai
- 975 Bea
- 976 Cukai
- 977 Pungutan/PNBP
- 978 Bantuan Presiden, Kementrian dan Bantuan Lainnya
- 979 .-

990 BENDAHARAWAN

- 991 SKPP / SPP
- 992 Teguran SPJ
- 993 -
- 994 -
- 995 -

II. TATA CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antara masalah dengan anak masalahnya, pada pola dengan memperhatikan, efek dari prinsip berjenjang. Tiap kode, kecuali kode pokok masalah pada perincian pertama, merupakan bagian dan sub ordinat dari kode atasannya, untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang masalah 412.31 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian 412.3 selanjutnya diketahui bahwa 412.3 merupakan bagian dari 412 dan 412 bagian dari 410, kemudian 410 bagian dari 400, disamping itu perlu diperhatikan kekuasaan kelas 000.

Contoh :

400 Kesejahteraan rakyat (perincian pertama)
410 Pembangunan desa (perincian kedua)
411 -
412 Perekonomian desa (perincian ketiga)
412.1 -
412.3 Koperasi desa (perincian keempat)
412.31 BUUD (perincian kelima)

2. Untuk dapat mengklasifikasikan surat dengan kode yang setepat-tepatnya haruslah dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandang mana masalah itu disajikan. Untuk menentukan masalah dalam surat tidak selalu mudah, pada umumnya "tentang hal" surat yang dicantumkan dibagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali "tentang hal tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat, oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, "bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode".
3. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah, masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain, atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok.
4. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terpreinci. Masalah Peraturan Kabupaten/Kota dapat secara berturut-turut diberi kode :
 - a. Peraturan Daerah/Qanun Kabupaten/Kota
 - b. Peraturan Daerah/Qanun
 - c. Peraturan
 - d. Peraturan Perundang-UndanganUntuk instansi yang besar dapat mempergunakan pemberian kode dimaksud huruf (a), sedangkan makin kecil suatu instansi dapat mempergunakan kode dimaksud huruf (b) atau huruf (c) yang lebih sederhana, dan untuk instansi kecil, misalnya Kecamatan dapat mempergunakan kode dimaksud huruf (d).
5. Kode Bantu
Kode bantu merupakan pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan dibelakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dengan ditambahkan kode bantu, maka kode dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip

Contoh :

591	tata guna tanah
.02	kode bantu penelitian
591.02	penelitian tata guna tanah
413.1	pemukiman kembali penduduk
.06	kode bantu seminar
413.106	seminar pemukiman kembali penduduk

6 Menyusun kode

Untuk memperoleh kode yang lebih spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode masalah-masalah yang lain. Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada 050 dan 700. Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terperinci maka kode 050 dapat disambungkan seluruh perincian kode dalam pola dari 000 sampai dengan 900. Begitu juga pengawasan 700 yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola,

7 Apabila pada kode ada petunjuk tambahan perincian berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu pada kode pola yang lain.

Contoh I :

055	proyek bidang perekonomian
511.2	pasar
055.112	proyek pembangunan pasar

Contoh II :

056	proyek bidang pekerjaan umum
630	jembatan
056.3	proyek jembatan angka 0 paling belakang sesudah titik desimal dihilangkan

8 Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan dua macam kode, dan dua kode yang berlainan itu sama-sama benar .

Contoh :

- a. Peraturan Pemerintah tentang Pensiun, dapat diklasifikasikan dengan kode 188.31 Peraturan Pemerintah atau 882.08 Peraturan tentang Pensiun. Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambahkan dengan kode bantu untuk Peraturan Perundang-undangan (08).
- b. Penelitian penghasilan pamong desa, dapat diklasifikasikan 070 (Penelitian) atau 142.02 (penelitian penghasilan pamong desa). Masalahnya penghasilan pamong desa (142) ditambahkan dengan kode bantu untuk penelitian (02).

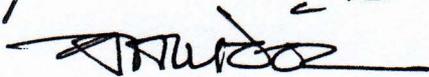
Kedua cara pengklasifikasian ini sama-sama benar. Cara ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara pengelompokan semua jenis Peraturan Perundang Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode bantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalahnya, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah dengan kode bantu

9 Tunjuk Silang

Jika ditemukan surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat kartu tunjuk silang. Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode. Satu kode diisikan pada kartu kendali dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dua arah. Surat tentang : "persawahan untuk transmigrasi" dapat diberikan kode 521.5 (persawahan) dengan tunjuk silang : 475 (transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan, bahwa penggunaan untuk tunjuk silang terbatas pada masalah yang memang sangat penting.

10 Indeks Kaitan

Untuk memudahkan penelusuran, kode-kode disusun indeks kaitan, indeks kaitan ini terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi, yang disusun urutan abjad dengan diikuti kodenya. Jadi dalam indeks kaitan letak kode ada dibelakang masalah, sedangkan dalam pola klasifikasi ada didepannya. Indeks kaitan dimaksudkan untuk memudahkan mencari masalah dalam arsip

GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH